

SKRIPSI

**PENDEKATAN PARTISIPATIF *MULTI-STAKEHOLDER* DALAM
PEMULIHAN PARIWISATA PASCA *COVID-19* DI BULUKUMBA**



Oleh:

NURZAFIQAH

Nomor Induk Mahasiswa: 105641101920

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PENDEKATAN PARTISIPATIF *MULTI-STAKEHOLDER* DALAM
PEMULIHAN PARIWISATA PASCA *COVID-19* DI BULUKUMBA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURZAFIQAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101920

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

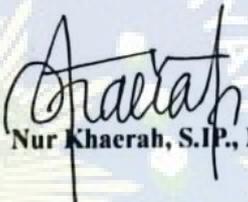
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pendekatan Partisipatif *Multi-Stakeholder* dalam
Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba
Nama Mahasiswa : Nurzaqiqah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101920
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Pembimbing II

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ahmad Harakan S.IP., M.H.I
(NBM. 1707 163



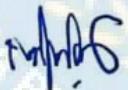
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0234/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, tanggal 20 februari 2024

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji:

1 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

()

2 Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

()

3 Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.

()

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurzafiqah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101920
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pendekatan Partisipatif *Multi-Stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba” ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain, tidak melakukan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Januari 2024

Yang menyatakan,

Nurzafiqah

ABSTRAK

Nurzafiqah, Ahmad Harakan, dan Nur Khaerah. Pendekatan Partisipatif *Multi-Stakaholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba.

Pandemi *Covid-19* yang muncul pada tahun 2020 memberikan pengaruh pada sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba, dalam konteks ini, pendekatan partisipatif multi *stakeholder* muncul sebagai strategi yang potensial untuk pemulihan pariwisata, oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan indikator pendekatan partisipatif.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder dan primer. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, partisipasi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan menjadikan Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* yang berwewenang menetapkan keputusan dan unsur lainnya terlibat secara tidak langsung dengan memberikan ide dan saran yang disalurkan dalam rapat formal dan non formal. Kedua, ide dan saran ini kemudian diwujudkan dalam partisipasi pelaksanaan yang berbentuk MoU dan bantuan yang diberikan. Ketiga, hubungan *simbiosis mutualisme* terjalin, di mana para *stakeholder* merasakan manfaat dari kerjasama yang mereka bentuk. Keempat, evaluasi aktif dilakukan para *stakeholder* untuk memastikan efektivitas kerjasama yang terjalin. Penelitian ini dapat memberikan sumbansi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang menerapkan atau tidak menerapkan pendekatan serupa sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keunggulan dan kelemahan dari pendekatan partisipatif *multi-stakeholder*.

Kata Kunci: Pendekatan Partisipatif, *Multi-Stakeholder*, Pariwisata Bulukumba

ABSTRACT

Nurzafiqah, Ahmad Harakan, dan Nur Khaerah. Multi-Stakaholder Participatory Approach in Post-Covid-19 Tourism Recovery in Bulukumba.

The Covid-19 pandemic that emerged in 2020 had an influence on the tourism sector in Bulukumba Regency, in this context, a multi-stakeholder participatory approach emerged as a potential strategy for tourism recovery, therefore this study aims to determine the extent of multi-stakeholder participatory in post Covid-19 tourism recovery in Bulukumba Regency using participatory approach indicators.

This type of research is descriptive qualitative using secondary and primary data types. The determination of informants is carried out by purposive sumpling techniques. Meanwhile, data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. To analyze data is done by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study show that first, stakeholder participation in decision making makes the Tourism Office the leading sector with the authority to make decisions and other elements are indirectly involved by providing ideas and suggestions that are channeled in formal and informal meetings. These two, ideas and suggestions are then realized in the implementation participation in the form of an MoU and the assistance provided. Third, a symbiotic relationship of mutualism is established, where stakeholders feel the benefits of the cooperation they form. Fourth, active evaluation is carried out by stakeholders to ensure the effectiveness of cooperation. This research can provide useful knowledge contributions for future researchers to conduct comparative studies with other countries that apply or do not apply similar approaches so as to provide a deeper understanding of the advantages and duration of multi-stakeholder participatory approaches.

Keywords: *Participatory Approach, Multi-Stakeholder, Tourism Bulukumba*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Judul "Pendekatan Partisipatif *Multi-Stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba". Sungguh tidak ada kata sempurna selain mengucap syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya baik secara fisik maupun secara akal fikir. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dan bimbingan serta dukungan semua pihak yang terlibat di dalamnya sehingga hambatan dan kesulitan terasa mudah untuk dilewati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat istimewa di hidup penulis, yaitu kedua orang tua yang sangat jauh dari tatapan mata, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Darma yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas limpahan cinta yang tulus dan kasih sayang, do'a yang tak pernah putus, perhatian yang begitu lembut, nasihat, motivasi, materi serta

pengorbanan yang kalian berikan telah menjadi pilar kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan skripsi ini. *I love u more.*

Penulis sangat berharap skripsi ini tidak hanya menjadi benda berdebu di rak buku, melainkan sebuah karya yang memberikan inspirasi, ilmu, dan memberikan dampak positif bagi pembaca dan dunia akademis. Semoga setiap kata yang tertuang di dalamnya menjadi sumber pengetahuan yang bernilai dan berguna. Serta pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi penulis untuk menimba ilmu di kampus biru ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) sekaligus pembimbing I (satu) yang telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi penulis. Terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat.
4. Ibu Nur Khaerah S.IP.,M.IP. Selaku sekretaris program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) sekaligus pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktu berharganya untuk memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sejak awal sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mendidik dalam proses akademik penulis.
6. Kepada member LUNATIK yang tak kalah penting kehadirannya, Isnianty Nahariah Restu Ramadhani, Alifita S.Massi, Nurul Annisa Anastasya, Nur Fitri Chasana, Fatima Azahra yang telah menemani penulis dari semester awal hingga saat ini. Terima kasih karena senantiasa merayakan hari spesial penulis, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, dan terima kasih karena selalu memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga persaudaraan ini tak berhenti di dunia perkuliahan saja.
7. Sahabat sejak SMA dan sepupu seperjuangan Wiwik Arsan dan Nurul Asmila yang leluconnya senantiasa menghibur penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020 khususnya kelas IP A yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman KKP angkatan XXVII (27) tahun 2023 Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang dijuluki warga Batulabbu dengan sebutan Siliwangi, Dian Alfiani, Nurfadillah, Nita, Ismawati, Alfira Yuniar, Wahyudi, dan A. Asdar yang telah menjadi pendengar yang baik serta seperti keluarga yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka.

10. Terkhusus Nita yang juga sedang berproses dalam penyusunan skripsi beserta keluarga dan Nurfadilla. Terima kasih telah ikhlas menemani penulis dalam proses penelitian dan penyusunan hasil dan pembahasan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa bersedia direpotkan dalam proses penyusunan skripsi penulis. *You are the best*
11. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan maupun dari pandangan pengetahuan oleh karena itu, peneliti berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Penulis juga sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 27 Januari 2024

Nurzafiqah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Partisipasi	8
2. Teori Analisis <i>Stakeholder</i>	16
3. Konsep Pariwisata Pasca <i>Covid-19</i>	27
C. Kerangka Pikir	32

D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	37
C. Informan.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan Penelitian.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan	39
Tabel 4.1 Unsur-Unsur Pentahelix Pariwisata.....	55
Tabel 4.2 Tupoksi Unsur-Unsur Pariwisata dalam Menjalani Kerja Sama dengan Dinas Pariwisata.....	80
Tabel 4.3 Program Hasil MoU Dinas Pariwisata dengan <i>Multi-Stakeholder</i>	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Gambar 2.2 Model <i>Pentahelix</i>	19
Gambar 2.3 Model Hubungan <i>Stakeholder</i>	22
Gambar 2.4 Diagram Model <i>Stakeholder Saliance</i>	23
Gambar 2.5 Kerangka Pikir Teori.....	33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.....	53
Gambar 4.3 Rapat Bersama Para Stakeholder Pariwisata.....	78
Gambar 4.4 Penandatanganan MoU DISPARPORA dengan PT. Asuransi Jasa Raharja	82
Gambar 4.5 Penandatanganan MoU DISPARPORA dengan Komunitas GENPI.....	83
Gambar 4.6 Penandatanganan MoU DISPARPORA dengan POLTEKPAR	84
Gambar 4.7 Bantuan DLHK ke Dinas Pariwisata	85
Gambar 4.8 Bantuan Bank SULSELBAR.....	86
Gambar 4.9 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata.....	87
Gambar 4.10 Daftar Realisasi PAD Tahun 2020-2022.....	88

DAFTAR SINGKATAN



KSPD	:	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
DISPARPORA	:	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MSP	:	<i>Multi Stakeholder Partnership</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
SRI	:	<i>Stanford Research Institute</i>
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RIPPARNAS	:	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional
KEMENPAREKRAF	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
CHSE	:	<i>Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability</i>
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
GENPI	:	Generasi Pesona Indonesia
MASATA	:	Masyarakat Sadar Wisata
POLTEKPAR	:	Politeknik Pariwisata Makassar
LB3	:	Limbah Bahan Berbahaya Beracun
MoU	:	Momerandum Of Understanding
UU	:	Undang-Undang
ABCGM	:	<i>Academician, Business, Community, Government dan Media</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Selatan sebagai sebuah provinsi yang masuk dalam daftar tujuan wisata utama di Indonesia, menawarkan beragam pilihan objek wisata termasuk wisata alam, budaya, dan buatan, dengan berbagai destinasi menarik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota seperti Pantai Losari di Makassar, Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, Pantai Marina Kabupaten Bantaeng (Ahmad, 2018). Potensi wisata yang beragam menjadi daya tarik wisatawan domestik bahkan mancanegara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai inisiatif pengembangan bisnis dalam sektor pariwisata yang didukung oleh berbagai upaya kerja sama dari pihak yang terkait (Arisma, 2019).

Salah satu destinasi wisata Sulawesi Selatan yang banyak diminati para wisatawan lokal hingga mancanegara adalah Kabupaten Bulukumba. Hal ini didasarkan pada potensi yang ada di wilayah Bulukumba dengan julukan "Butta Panrita Lopi" dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang beragam. Secara astronomi, Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20'–05°40' Lintang Selatan dan 119°58'–120°28' Bujur Timur sedangkan secara geografis, Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai kurang lebih 128 Km sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim (Ramadahni, 2020). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, menjelaskan bahwa daerah Bulukumba ini diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) (Harris, 2022).

Portal Informasi Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengelompokkan sektor pariwisata menjadi 4 kategori. Pertama, wisata bahari meliputi Pantai Tanjung Bira, Pantai Bara, Apparalang dan Samboang. Kedua, wisata buatan yang terdiri dari Permandian Limbua, dan Wisata Empang Sari. Ketiga, wisata alam meliputi Hutan Mangrove Lumpung, dan Hutan Kota Bulukumba. Keempat, wisata religi meliputi Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Beberapa destinasi pariwisata tersebut, kawasan Bira menjadi pusat pariwisata yang terletak di bagian timur Kabupaten Bulukumba, wisata yang berada di kawasan bira meliputi Pua Janggo, Makam Daro Tiro, Permandian Hila-Hila, Pantai Lolisang, Pantai Samboang, Pantai Panrang Luhur dan beberapa destinasi lainnya (Adiwinata 2020).

Pada tahun 2020 pariwisata di Kabupaten Bulukumba menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kedatangan pandemi *Covid-19* memberikan pengaruh pada sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Pembatasan perjalanan, lockdown, dan ketidakpastian yang berkembang telah mengganggu aktivitas pariwisata secara signifikan, mengakibatkan penghentian kegiatan pariwisata, pendapatan dan keseluruhan dinamika pariwisata. Dampak ini tidak hanya terasa di sektor pariwisata tetapi merambat ke sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, serta kerajinan dan budaya lokal.

Keputusan Presiden Nomor 12/2020, pemerintah Indonesia menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana Nasional. Hal ini menghasilkan penerapan kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran *Covid-19*, yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan ke pariwisata (Maria & Hudiono 2020). Menariknya, jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau domestik pada masa pandemi covid-19 hingga memasuki new-normal tidak terjadi penurunan yang signifikan.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) bahwa dari tahun 2017-2022 terjadi peningkatan jumlah pengunjung nusantara dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan minat yang kuat dari wisatawan domestik dalam menjelajahi keindahan pariwisata Kabupaten Bulukumba. Bertolak belakang dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama periode *Covid-19* terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2018, ada 3.557 turis mancanegara yang berkunjung, namun angka ini merosot secara dramatis selama pandemi. Pada tahun 2019, hanya ada 2.260 turis, dan pada tahun 2020, jumlahnya turun drastis menjadi hanya 293 orang, ini adalah penurunan yang sangat besar (Pratiwi & Acfira 2023).

Kondisi sektor wisata Kabupaten Bulukumba yang mengalami perubahan drastis menuntut perubahan tatanan baru atau kehidupan *new normal*. Dalam Forum G20 salah satu prioritas utama agenda penting Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo adalah memulihkan kembali sektor

pariwisata yang terdampak akibat dari pandemi *Covid-19* (Marwan & Isnaeni 2022). Pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* menjadi tujuan krusial yang memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 2005 memberikan amanat yang jelas bahwa seluruh sektor di Indonesia diharapkan mendukung pembangunan pariwisata (Anggraeni & Sari 2020).

Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* muncul sebagai strategi yang potensial untuk memulihkan industri pariwisata pasca *Covid-19*. Menurut Hadi *stakeholders* adalah semua pihak, internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sumilat & Destriana 2017). *Stakeholder* mengacu pada kumpulan aktor dari berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam suatu isu atau masalah tertentu.

Aktor-aktor *stakeholder* yang umum dalam sektor pariwisata yaitu; pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan strategi pemulihan pariwisata. Mereka dapat memberikan insentif dan dukungan keuangan (Wikayanto et al., 2022). Masyarakat sebagai pelaku usaha dapat terlibat dalam merawat dan mempromosikan destinasi mereka, serta memberikan pengalaman positif kepada wisatawan. Sektor swasta memiliki peran kunci dalam menggerakkan pemulihan pariwisata. Institusi akademisi dapat mendukung pemulihan pariwisata melalui penelitian dan pemahaman

mendalam tentang tren terbaru dan praktik terbaik dalam industri. Pendekatan *multi-stakeholder* mengakui bahwa pemulihan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam industri pariwisata. Partisipasi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan seperti, pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi serta berbagai *stakeholder* lainnya menjadi kunci untuk memastikan pemulihan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pendekatan Partisipatif *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba untuk melihat sejauh mana partisipatif *multi-stakeholder* dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penting dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten bulukumba diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan teori. Penemuan dan hasil analisis dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja teoritis yang lebih khusus tentang bagaimana partisipasi *multi-stakeholder* dapat diterapkan dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19*
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Peneliti lain dapat membangun penelitian mereka sendiri berdasarkan metodologi dan temuan dari penelitian ini, sehingga memperluas pemahaman kolektif tentang isu-isu terkait partisipasi *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19*.

2. Kagunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu dan konsep yang terkait pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* khususnya dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di wilayah tertentu.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa bagaimana teori partisipatif *stakeholder* diterapkan dalam situasi nyata.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah setempat dalam merancang kebijakan pemulihan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mendorong partisipasi aktif *stakeholder* dalam upaya pemulihan

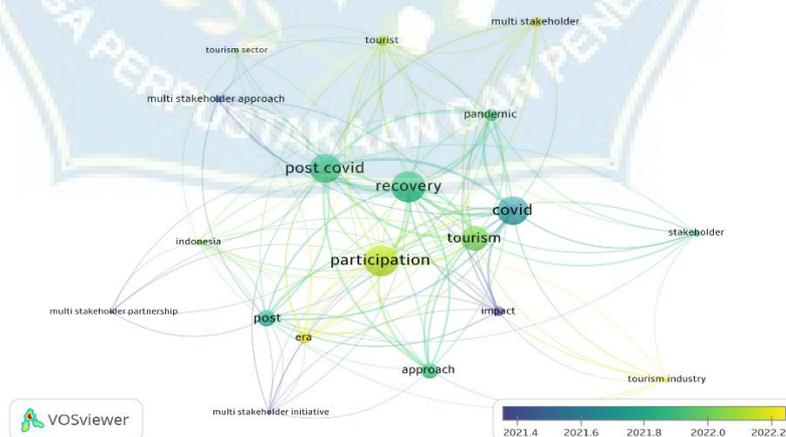


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan diuraikan secara sistematis mengenai penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian (Halim, 2016). Penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis untuk menjadi landasan pembanding dan sebagai referensi untuk memperkaya teori yang akan digunakan dalam menyajikan kontribusi penyempurnaan dari penelitian terdahulu dengan konsep yang berbeda dalam sebuah penelitian baru. Adapun beberapa kajian terdahulu yang masih relevan dengan judul Pendekatan Partisipatif *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba dengan penelitian terdahulu yang di kelola menggunakan vosviewer sebagai berikut:



Gambar 2.1: Penelitian Terdahulu

Sumber: *overlay visualization vosviewer*

Pada gambar di atas menunjukkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan aplikasi *publish or perish*, lebih dari 110 artikel jurnal ditemukan dalam rentang tahun 2013-2023, yang berkaitan dengan kata kunci pendekatan partisipasi; *multi-stakeholder*; pemulihan pariwisata pasca *covid-19*.

Artikel-artikel ini secara cermat dikelola melalui penggunaan aplikasi *vosviewer*. Hasil dari visualisasi *vosviewer* mengelompokan 4 klaster. Klaster 1 dengan warna kuning mencakup 4 item yakni partisipasi; multi pemangku kepentingan; zaman; industri pariwisata. Klaster 2 berwarna hijau yang terbagi atas 8 item yaitu pemulihan, pasca *covid*, pariwisata; pasca; pendekatan; pandemi; turis; Indonesia. Klaster 3 berwarna biru dengan 2 item yakni *covid*; pemangku kepentingan. Klaster 4 berwarna ungu yang terbagi atas 4 item meliputi dampak; pendekatan multi pemangku kepentingan; inisiatif multi pemangku kepentingan; kemitraan multi pemangku kepentingan.

Dalam konteks penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang tentang pendekatan partisipasi *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Bulukumba. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada pendekatan yang di gunakan, yaitu pendekatan partisipasi *multi-stakeholder* yang telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang efektif dalam menghadapi tantangan kompleks dalam berbagai bidang. Sebagaimana yang tercantum dalam penelitian terdahulu yang berjudul Peran Kolaborasi

Stakeholder Sektor Pariwisata Dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah, Indonesia Pasca *Covid-19* (Handayani et al., 2022). Jurnal tersebut menggaris bawahi pentingnya pendekatan partisipasi *multi-stakeholder* dalam mengatasi tantangan kompleks dalam berbagai sector salah satunya sector pariwisata, termasuk dalam pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Penelitian ini menyoroti bagaimana kerjasama antara pemangku kepentingan di sektor pariwisata dapat menjadi faktor kunci dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi di tengah tantangan yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19*, seperti pemerintah, komunitas lokal, pelaku industri, dan lembaga non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk memajukan kawasan pariwisata tersebut.

Lebih lanjut, penelitian Model Proses Penanganan *covid-19* dalam Perspektif *Multi-stakeholder Partnership* yang membahas tentang paradigma kemitraan *multi-stakeholder* layak menjadi alat analisis dimana *Multi-stakeholder Partnership (MSP)* menekankan pada keterlibatan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada membangun dialog dan kolaborasi konstruktif berbasis kesukarelaan (Amin et al. 2022).

Pendekatan *Multi-stakeholders* dalam Penanganan *Overloading* yang menyoroti tentang bagaimana strategi penanganan masalah *overloading* atau kelebihan beban dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan *multi-stakeholder* (Gunarta & Santoso, 2006).

Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy

GAP dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan menyoroti tentang bagaimana keterkaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan fenomena kesenjangan legitimasi (legitimacy gap) dalam konteks peningkatan kinerja perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015).

Strategi Pemulihan Pariwisata Desa Wisata Pasca Covid: Pendekatan Partisipatif Multipihak menyoroti tentang menyoroti bagaimana strategi pemulihan pariwisata di desa wisata setelah terjadi pandemi COVID-19 melalui pendekatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, pelaku bisnis, dan pihak lainnya. Dengan adanya pendekatan partisipatif, diharapkan strategi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di desa Bantul provinsi Yogyakarta (Nasution et al., 2023).

Perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam visualisasi *vosviewer* di atas dapat dilihat tidak terdapat penelitian partisipasi *stakeholder* di kabupaten Bulukumba. Pada gambar 2.1 lokasi penelitian lebih kepada wilayah Indonesia yang tidak menunjukkan daerah mana yang paling banyak penelitian tentang pendekatan partisipasi *stakeholder*. Selain lokasi perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yang lebih banyak mengarah kepada sector seperti pada jurnal-jurnal di atas. Dengan adanya perbedaan yang signifikan dan belum ada keterbaruan penelitian mengenai penggunaan pendekatan partisipasi *multi-*

stakeholder dalam pemulihan pariwisata terkhusus di Kabupaten Bulukumba sehingga peneliti tertarik meneliti Pendekatan Partisipasi *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba karena ingin mengeksplorasi bagaimana pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi dampak krisis yang di akibatkan oleh *Covid-19*. Fokus pada pemulihan pasca pandemi yang menambah elemen penting dalam memahami bagaimana berbagai pihak dapat bekerjasama dengan menggunakan teori *pentahelix* yang mendukung konsep ketahanan (*resilience*) dan pertumbuhan berkelanjutan untuk membangkitkan kembali industri pariwisata yang terdampak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Partisipasi

Partisipasi secara harfiah berarti ikut serta dalam s' suatu kegiatan, keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa keterlibatan adalah sebagai bukti niat untuk memperbaiki demokrasi melalui proses desentralisasi yang mendorong perencanaan dari bawah ke atas dan melibatkan masyarakat dalam proses rencana dan pembangunan komunitasnya (Hakim et al. 2018).

Davis dan Newstrom mengemukakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam konteks kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok.

Dauids dan Newstrom mengemukakan ada tiga konsep penting dari definisi partisipasi (Sallatu, 2007), yaitu:

- a. Keterlibatan atau partisipatif mengacu pada adanya keterlibatan mental dan emosional selain aktivitas fisik.
- b. Kontribusi yang sangat penting dalam partisipasi adalah dorongan yang mendorong orang untuk berpartisipasi. Mereka diberi kesempatan untuk memanfaatkan kreativitas dan inisiatif mereka untuk mencapai tujuan bersama organisasi.
- c. Tanggung jawab yang muncul sebagai hasil dari partisipasi yang mendorong orang untuk memikul tanggung jawab atas tugas yang dilakukan oleh kelompok.

Menurut efendi partisipasi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi vertical dan partisipasi horizontal. Konsep partisipasi vertikal merujuk pada situasi tertentu di mana masyarakat terlibat atau ikut serta dalam program yang diadakan oleh pihak lain sebagai bawahan, pengikut, atau klien dari pihak yang menyelenggarakan program tersebut, sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat memiliki inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara sejajar satu sama lain. Bentuk partisipasi seperti ini menandakan awal dari pertumbuhan masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (Mamuko et al. 2016).

Sundariningrum mengelompokkan partisipasi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat keterlibatan (Robial et al., 2023), yakni:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi Langsung adalah ketika seseorang secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan atau proses, dan ini melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai aspek dari kegiatan atau proses tersebut.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi Tidak Langsung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk partisipasi yang kurang aktif atau lebih pasif dalam kegiatan atau proses tertentu.

Cohen dan Uphoff, seperti yang dijelaskan oleh Siti Irene A.D. mengategorikan partisipasi menjadi empat jenis (Yasril & Nur 2018), yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Individu atau kelompok memiliki hak untuk berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merujuk pada individu atau kelompok masyarakat terlibat secara langsung dalam menjalankan program atau proyek yang telah dirancang. Hal ini mencakup berkontribusi dengan sumber daya, tenaga kerja, atau keahlian yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Keterlibatan dalam pengambilan manfaat merujuk pada peran masyarakat dalam mendapatkan atau memanfaatkan hasil dari program, kebijakan, atau proyek yang telah dilaksanakan.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Keterlibatan dalam evaluasi merujuk pada peran masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses menilai atau mengkaji program, proyek, atau kebijakan tertentu.

Burt K. Schalan dan Roger yang telah di jelaskan Widi Astuti menyatakan bahwa manfaat dari partisipasi dapat diuraikan (Simaremare, 2022) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komunikasi yang berlangsung dua arah.
- b. Meningkatkan pengaruh dari bawahan dalam pengambilan keputusan.
- c. Mengurangi perilaku agresif dari manajer terkait dengan partisipasi.
- d. Membuka peluang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan diakui dalam tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki nilai yang sangat penting untuk kesuksesan organisasi (Ahmad Mustanir et al., 2022), yaitu:

- a. Meningkatkan peluang pengambilan keputusan yang benar karena adanya kontribusi yang berarti dan positif.

- b. Memajukan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan ide dan pendapat.
- c. Mendorong penggunaan kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.
- d. Melatih tanggung jawab individu dan mendorong upaya membangun kepentingan bersama.
- e. Mengizinkan adaptasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.

2. Teori Analisis *Stakeholder*

a. *Multi-Stakeholder*

Multi berasal dari bahasa latin yaitu *naons* yang berarti banyak atau bermacam-macam (Echa, 2018). Menurut KBBI multi adalah banyak, lebih dari satu, dan beragam, sedangkan *stakeholder* adalah individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang memiliki kepentingan, peran, atau pengaruh dalam suatu proyek, organisasi, atau situasi tertentu (Agustus, 2023), jadi *multi-stakeholder* adalah menyatukan pemangku kepentingan di wilayah tertentu untuk berpartisipasi dalam bentuk komunikasi baru, pengambilan keputusan mengenai isu tertentu (Hemmati, 2012).

Menurut Harris Gleckman *multi-stakeholder* adalah sistem tata kelola global baru yang berupaya untuk menyatukan aktor-aktor global yang memiliki potensi kepentingan dalam suatu isu untuk secara

kolaboratif mencari solusi (Buxton & Power 2019). *Multi-stakeholder* sering digunakan dalam konteks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang beragam dan memerlukan kolaborasi yang kuat di antara mereka (Fajri, 2022).

Multi-stakeholder melibatkan beragam aktor misalnya lembaga pemerintah, LSM, aktor swasta, akademisi, media dan pihak lain yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Hamka et al., 2022). Kerjasama *multi-stakeholder* bisa diterapkan dalam berbagai area yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dengan berbagai sumber daya. Kerjasama *multi-stakeholder* di bidang lain difokuskan pada hal seperti pengembangan bisnis, inovasi teknologi, atau penanganan masalah kesehatan dan kebencanaan (Xue et al., 2020).

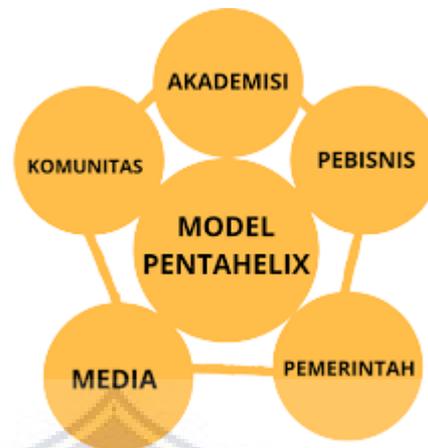
Salah satu peran *multi-stakeholder* dalam kebencanaan yaitu pemulihan *covid-19*, karena dampak pandemi *covid-19* bersifat multidimensi yaitu mempengaruhi semua bidang kehidupan dan seluruh populasi global. Tidak ada satu lembaga atau pemangku kepentingan yang dapat bekerja sendiri untuk mengendalikan *covid-19* secara efektif dan memitigasi dampaknya (Panneer et al., 2021). Peran *multi-stakeholder* tentang kebencanaan ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan sebuah masalah tidak bisa dilakukan oleh satu unsur saja, tetapi membutuhkan komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan Hamka dimana *multi-stakeholder*

melibatkan berbagai aktor, maka *pentahelix* sebagai konsep dari *multi-stakeholder* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penggunaan sumber daya yang beragam dalam upaya mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah yang dihadapi.

Konsep *pentahelix* di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 2016 melalui gagasan Menteri Pariwisata tahun jabatan 2014-2019 Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. Gagasan tersebut kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, dan pelayanan pariwisata, serta menciptakan pengalaman berharga dan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat maka diperlukan upaya pengoptimalan peran pengusaha, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media dalam sistem pariwisata (Budhi et al. 2022).

Model *pentahelix* yang diperkenalkan oleh Carayannis dan Campbell dengan menekankan hubungan *multi-stakeholder* merupakan perkembangan dari gagasan *triple helix* dan *quadruple helix* yang diadopsi dari teori Etzkowitz dan Leydesdorff.

Hubungan *multi-stakeholder* dapat disusun dalam rumus ABCGM, yang terdiri dari *Academician* (akademisi), *Business* (bisnis), *Community* (komunitas), *Government* (pemerintah), dan media (Carayannis & Campbell 2010).



Gambar 2.2: Model *Pentahelix*

Dalam konsep *pentahelix* pariwisata, kelima elemen utama yaitu *academician* (akademisi), *business* (bisnis), *community* (komunitas), *government* (pemerintah), dan media memiliki peran penting dalam pemulihan dan pengelolaan sektor pariwisata. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang peran masing-masing elemen (M. A. Hakim, 2022), yaitu:

1) *Academician* (akademisi)

Academician atau akademisi memiliki peran penting dalam pemulihan pariwisata. Mereka melakukan penelitian dan analisis untuk memahami dampak pandemi atau tantangan lain pada pariwisata. Akademisi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan industri pariwisata berdasarkan penelitian mereka.

2) *Business* (bisnis)

Bisnis atau juga disebut sebagai sektor swasta dalam pemulihan pariwisata berperan sebagai motor penggerak yang menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi, sumber daya finansial, dan berbagai fungsi lain yang terkait dengan pengembangan produk dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sebagai agen perubahan sosial.

3) *Community* (Komunitas)

Dalam konsep *pentahelix*, komunitas merujuk pada kelompok masyarakat atau komunitas lokal yang berada di sekitar atau terlibat dalam suatu industri atau inisiatif tertentu. Peran komunitas sangat penting, terutama dalam konteks pengembangan dan pemulihan berbagai sektor seperti pariwisata, teknologi, atau pembangunan sosial.

4) *Government* (Pemerintah)

Pemerintah dalam konteks perubahan sosial harus berperan sebagai regulator sekaligus kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam suatu permasalahan. Pemerintah berperan dalam mengatur industri pariwisata melalui kebijakan, peraturan, dan regulasi.

5) Media

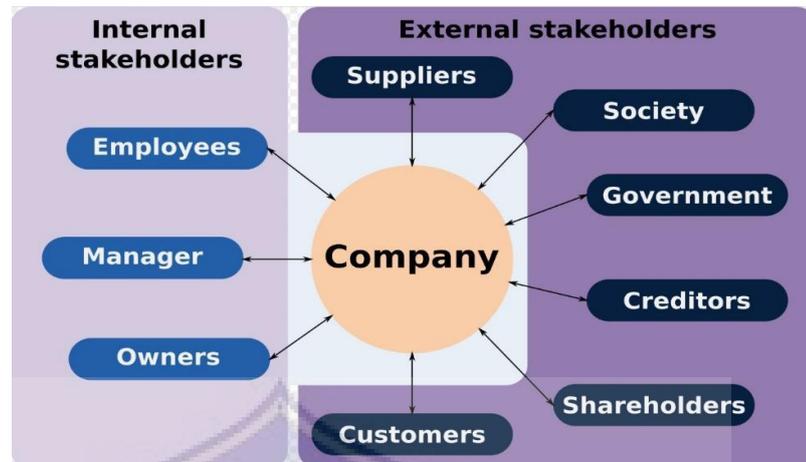
Media memiliki peran penting dalam mempromosikan destinasi pariwisata dan menyebarkan informasi kepada calon wisatawan.

b. *Stakeholder*

Konsep *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 2020). Menurut Freeman dan McVea *stakeholder* merujuk kepada sekelompok orang atau individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau terpengaruh oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi (Pandansari, 2016).

Menurut Ghozali dan Chariri teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang semata-mata berfungsi untuk memajukan kepentingan internalnya, tetapi juga diwajibkan memberikan keuntungan kepada *stakeholder* seperti pemegang saham, kreditur, pelanggan, penyedia barang, analis, karyawan, pemerintah, dan elemen lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari konteks sosial (Gantino, 2016).

Konsep *stakeholder* menurut Freeman yang telah dijelaskan sebelumnya, ia mengemukakan model hubungan kategori *stakeholder* dalam dua bentuk, yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal yang dapat diuraikan (Freeman et al., 2010) sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Model Hubungan Stakeholder

1) *Stakeholder* internal

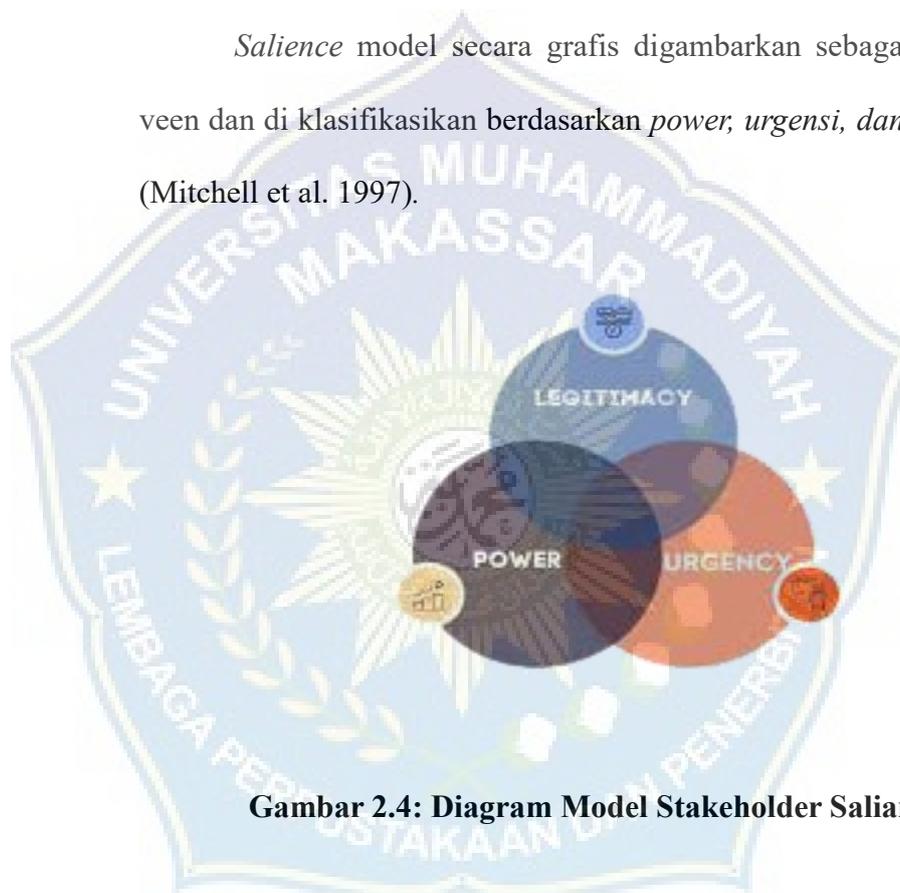
Stakeholder internal adalah sekelompok individu yang terlibat dalam suatu perusahaan. Contoh individu yang termasuk dalam kategori *stakeholder* internal ini meliputi karyawan, pengelola dan pemilik.

2) *Stakeholder* eksternal

Stakeholder eksternal adalah entitas yang memiliki peran dalam kepentingan bisnis di luar jangkauan perusahaan. *Stakeholder* eksternal atau pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dari luar lingkungan perusahaan melibatkan berbagai entitas seperti konsumen, penyedia barang, para investor, kompetitor, lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan berbagai pihak lainnya.

Mitchell, Agle, dan Wood mengembangkan sebuah model *stakeholder* yang dikenal dengan model *salience stakeholder*. Menurut Mitchell, Agle, dan Wood *salience stakeholder* adalah sejauh mana manajer memberikan prioritas dan perhatian terhadap klaim pemangku kepentingan yang bersaing.

Salience model secara grafis digambarkan sebagai diagram Venn dan di klasifikasikan berdasarkan *power*, *urgensi*, dan *legitimacy* (Mitchell et al. 1997).



Gambar 2.4: Diagram Model Stakeholder Salience

1) *Power* (kekuasaan)

Kekuatan mengacu pada kemampuan atau pengaruh yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan perusahaan. *Stakeholder* yang memiliki kekuatan yang lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap strategi, operasi, dan hasil perusahaan.

2) *Legitimacy* (legitimasi)

Legitimasi mengacu pada tingkat kesesuaian atau kelayakan dari tuntutan dan kepentingan yang dinyatakan oleh *stakeholder*. Legitimasi berhubungan dengan bagaimana *stakeholder* dipandang sebagai anggota yang sah dalam proses keputusan organisasi.

3) *Urgency* (urgensi)

Urgensi menggambarkan seberapa cepat *stakeholder* memerlukan respons dari perusahaan terhadap kepentingan atau kebutuhan mereka. Jika suatu *stakeholder* memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, maka perusahaan harus memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap *stakeholder* tersebut.

Menurut Maryono dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya *stakeholder* (Dewi et al., 2020; Yosevita, 2015) antara lain;

1) *Stakeholder* utama (primer)

Stakeholder primer utama merujuk kepada pihak yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pembentukan kebijakan, proyek, dan program. Mereka termasuk dalam kelompok pihak yang memiliki peran utama dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Beberapa contoh dari

stakeholder utama yaitu, Masyarakat, tokoh Masyarakat, serta manejer publik.

2) *Stakeholder* pendukung (sekunder)

Stakeholder sekunder merupakan elemen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu program, kebijakan, atau proyek. *Stakeholder* yang berperan sebagai pendukung berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam proses pengembangan suatu aktivitas dan memiliki dampak pada proses pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang termasuk sebagai stakeholders pendukung mencakup entitas seperti; Lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan pengusaha.

3) *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh dari *stakeholder* kunci yaitu; DPRD Kabupaten, serta Dinas yang bertanggung jawab langsung atas proses proyek tersebut.

Ada tiga fungsi utama dalam teori *stakeholder* menurut Donaldson dan Paterson (Lontah, 2015), yaitu:

1) Deskriptif

Teori stakeholder dengan pendekatan deskriptif, tujuannya adalah memahami bagaimana perusahaan menangani berbagai stakeholder dalam proses menjalankan aktivitas bisnis.

2) Instrumental

Pendekatan instrumental memiliki tujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan, melalui evaluasi hubungan dengan *stakeholder* serta pencapaian berbagai tujuan dalam pengelolaan perusahaan.

3) Normative

Pendekatan normatif dalam teori *stakeholder* menyiratkan bahwa setiap individu atau kelompok yang telah memberikan sumbangan terhadap nilai perusahaan memiliki hak etika untuk menerima imbalan dari perusahaan.

Mengadopsi pemikiran Freeman (1984), dalam konteks pariwisata, partisipasi *stakeholder* berperan andil dalam mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pemulihan pariwisata di suatu daerah. Sesuai dengan atributnya, *stakeholder* adalah entitas yang memiliki kebebasan dalam menentukan tujuan mereka sendiri dan mengambil langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut (Heger & Rohrbeck 2012). Menurut Dwyer & Edwards berbagai kelompok dan lembaga turut berkontribusi dalam mendukung pengelolaan pariwisata dengan memanfaatkan beragam potensi yang ada (Purnaya & Titing Koerniawaty 2018). Ada enam kelompok pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh terhadap pola pemulihan dan kebijakan pariwisata di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang signifikan secara global (Berliandaldo et al. 2021), yaitu:

- 1) Entetitas pemerintah
- 2) Industri swasta
- 3) Lembaga penyumbang dana lateral dan multilateral
- 4) Organisasi Masyarakat sipil
- 5) Komunitas lokal dan penduduk asing
- 6) Pengguna pelayanan

Pitana dan Gayatri mengklasifikasikan stakeholder menjadi pemerintah, pelaku bisnis/swasta, serta masyarakat karena mereka memegang peran dan fungsi yang bervariasi (Simanjourang et al. 2020). Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan yang mengikat. Swasta memiliki peran sebagai entitas bisnis yang memiliki potensi untuk menciptakan peluang pekerjaan. Sementara itu, masyarakat, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, berfungsi sebagai tuan rumah yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan (Rahim, 2012).

3. Konsep Pariwisata Pasca Covid-19

Wabah virus Covid-19 telah mengganggu stabilitas rantai pasok global dan pasar keuangan bahkan menyebabkan gangguan yang cukup besar terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Asal usul kata pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta, terdiri dari dua komponen, yaitu "pari" yang mengindikasikan pengulangan, dan "wisata" yang merujuk pada perjalanan atau aktivitas berpindah tempat. Dengan demikian, istilah pariwisata dapat

diartikan sebagai tindakan melakukan perjalanan secara berulang kali (Jubir et al., 2023).

Istilah pariwisata pertama kali muncul setelah diadakan Musyawarah Nasional *Tourisme* II di Tretes, Jawa Timur pada tahun 1958. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah *tourisme*. Pada saat itu, istilah *tourisme* digantikan dengan dharmawisata untuk merujuk pada perjalanan antar kota atau daerah tujuan wisata di dalam negeri (Indonesia), sedangkan istilah pariwisata digunakan untuk merujuk pada perjalanan lintas benua atau negara. Pada tahun 1960, istilah pariwisata semakin dikenal luas, dan Dewan *Tourisme* Indonesia berubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia. Orang-orang yang melakukan perjalanan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu wisatawan mancanegara (asing) dan wisatawan nusantara (domestik). Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang kepariwisataan, pariwisata merujuk pada beragam jenis kegiatan wisata yang diperkaya dengan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Mahardika, 2020).

Pemerintah Daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola segala aspek yang berkaitan dengan bidang pariwisata sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "mengelola" mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh hal yang terkait dengan sektor pariwisata,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa daerah diberi hak untuk mengatur serta menjalankan program pengembangan sektor pariwisata di wilayah mereka sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), fasilitas-fasilitas pariwisata dibagi menjadi beberapa kategori (Wea et al. 2023), yaitu:

- a. Tempat penginapan (*akomodasi*)
- b. Tempat makan
- c. Informasi dan layanan bagi wisatawan
- d. Pelayanan keimigrasian
- e. Pusat informasi pariwisata (*tourism information center*)
- f. Kios *e-tourism*
- g. Petugas polisi dan satuan tugas khusus wisata (polisi dan satgas wisata)
- h. Toko yang menjual cinderamata (*souvenir shops*)
- i. Tanda penunjuk arah untuk wisatawan
- j. Penghiasan taman atau area (*landscaping*).

Dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* pada hakekatnya melibatkan para pemangku-pemangku kepentingan seperti Masyarakat, pemerintah, sektor swasta (Eva et al. 2007).

Menurut Jamieson dan Nobleada beberapa prinsip-prinsip pariwisata yang tidak boleh diabaikan (Nur Adyla et al. 2023) antara lain:

- a. Prinsip utama dalam pariwisata yang mengedepankan pembangunan dan kemajuan masyarakat.
- b. Membantu menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di sekitar lokasi objek wisata yang dikelola. Dalam konteks pemulihan pariwisata, prinsip ini menciptakan lapangan kerja menjadi aspek kunci.
- c. Prinsip ketiga ini mengacu pada pentingnya pembuatan aturan dan regulasi yang berbasis pada standar internasional dalam rangka membangun pariwisata berkelanjutan.

Pandemi *Covid-19* telah mengubah paradigma pariwisata di Indonesia yang menuntut pemerintah untuk menghadirkan konsep-konsep atau kebijakan baru dalam pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* dimana kebijakan-kebijakan pemerintah (Pambudi et al., 2020), yaitu:

- a. *Pshysical distancing* dimana destinasi wisata mengatur jumlah pengunjung sesuai dengan kuota yang sudah diterapkan
- b. Bandara, terminal, dan stasiun harus mematuhi standar sanitasi yang sangat ketat
- c. Konsep *product differentiation* berfokus pada pengalaman alam terbuka yang segar, petualangan di pegunungan dan pantai, serta wisata kesehatan di luar ruangan bukan lagi pada pariwisata massal

- d. Konsep value proposition yang menekankan pengalaman berkualitas yang bersih dan segar daripada hanya menawarkan harga murah dan keramaian
- e. Perubahan fokus pemasaran dari perjalanan berkelompok ke perjalanan mandiri yang bebas
- f. Penting untuk menerapkan label kebersihan

Pemulihan menjadi fokus utama semua pihak dengan upaya keras untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang terpuak parah selama *Covid-19*. Promosi destinasi, dukungan keuangan, dan peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi komponen kunci dari pemulihan pariwisata (Herdiana, 2020). Pada bulan Agustus 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (KEMENPAREKRAF) mengambil langkah penting dalam mendukung industri pariwisata selama pandemi *Covid-19* dengan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan yang komprehensif. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan CHSE yaitu singkatan dari *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (Rosmilawati et al. 2022). Kebijakan protokol kesehatan *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) bertujuan untuk mendukung kelangsungan dan pemulihan industri pariwisata di Indonesia, sehingga bisa memenuhi permintaan wisatawan yang masih ingin bepergian selama masa pandemi (Lumanauw, 2020).

Kebijakan *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) dirancang untuk memastikan bahwa semua

pemangku kepentingan di sektor pariwisata, termasuk destinasi, akomodasi, restoran, dan penyedia layanan lainnya, mematuhi standar tinggi dalam hal kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti physical distancing, penggunaan masker, dan sanitasi yang intensif, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa perjalanan mereka aman dan sehat. Selain itu, *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) juga memberikan fokus pada keberlanjutan lingkungan, mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab terhadap alam dan budaya setempat (Fitriana et al., 2020).

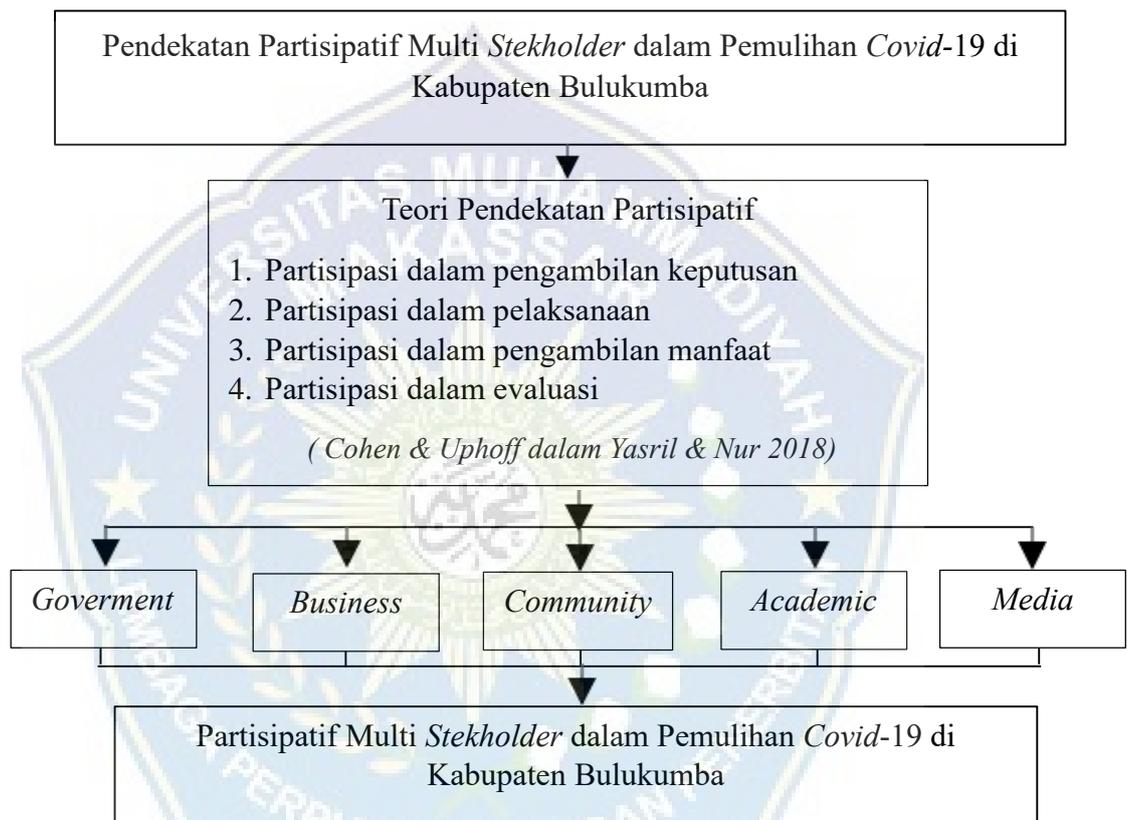
Pengimplementasian *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) adalah dengan pemberian sertifikat kepada pelaku bisnis yang telah melakukan protokol CHSE. Sertifikat tersebut menjadi sebuah bukti sah bagi para pelaku bisnis di industri pariwisata yang menyadari pentingnya memastikan keselamatan wisatawan dalam menggunakan layanan atau fasilitas mereka dan mengambil langkah-langkah serius untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19* (Oktari, 2021).

C. Kerangka Pikir

Menurut Dwiyanto kerangka pikir memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk menggambarkan dan mengklarifikasi tantangan yang diajukan dalam penelitian. Penulis pada penelitian Pendekatan Partisipatif *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba menggunakan indikator pendekatan partisipatif yang dikembangkan oleh

Cohen dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) dan *multi-stakeholder* pariwisata merujuk pada konsep *pentahelix* yang dikembangkan oleh Carayannis dan Campbell (2012).

Gambar 2.5 : Kerangka Pikir Teoris



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pendekatan partisipatif seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi dengan merujuk pada *multi-stakeholder*, seperti pemerintah daerah, swasta (pebisnis),

komunitas lokal, akademisi dan media dapat berkontribusi secara positif terhadap pemulihan sektor pariwisata di kabupaten Bulukumba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan aktif para *multi-stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merujuk pada keterlibatan aktif dan kontribusi *multi-stakeholder* dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program dari hasil keputusan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merujuk pada keterlibatan aktif dan adil *multi-stakeholder* dalam menikmati hasil atau manfaat dari suatu kebijakan, program, atau proyek yang dilaksanakan dari hasil keputusan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan aktif *multi-stakeholder* dalam proses evaluasi suatu kebijakan, program, atau proyek.

Teori *multi-stakeholder* menggunakan konsep *pentahelix* yang diperkenalkan oleh Carayannis dan Campbell terbagi atas GBCAM yaitu sebagai berikut:

1. *Government* (Pemerintah)

Dalam penelitian ini yang menjadi unsur pemerintah adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan sektor pariwisata serta perlindungan lingkungan hidup di daerah Bulukumba. Sebagai lembaga pemerintah, keduanya berperan dalam merumuskan kebijakan, mengatur regulasi, serta melaksanakan program-program yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing atas mandat dari pemerintah setempat.

2. *Business* (Bisnis/pengusaha)

Unsur bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Sulselbar dan PT Asuransi Jasaraharja Putera, walaupun dimiliki oleh BUMN tetapi kedua perusahaan ini bukanlah penyelenggara pemerintahan, melainkan penyelenggara usaha/bisnis yang menyediakan layanan bagi wisatawan.

3. *Community* (Komunitas)

Komunitas yang dimaksud dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba adalah Generasi Pesona Indonesia dan Masyarakat Sadar Wisata. Kedua komunitas ini merupakan iniatif masyarakat dalam mempertahankan dan memperkuat daya Tarik pariwisata.

4. *Academisi* (Akademik)

Akademisi yang dimaksud dalam pemulihan pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah Politeknik Pariwisata Makassar. Berperan sebagai konseptor yang memiliki peran kunci dalam mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep inovatif untuk mendukung pemulihan pariwisata. Melakukan penelitian, analisis, dan pengembangan solusi yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri pariwisata, serta berperan dalam mempromosikan pariwisata.

5. Media

Media yang dimaksud dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba adalah Simpul Indonesia yang memiliki peran dalam memperluas informasi dan mempromosikan destinasi pariwisata. Media memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan daya tarik, fasilitas, dan budaya dari destinasi pariwisata kepada audiens luas, termasuk calon wisatawan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah penelitian yang sedang diteliti (Insani et al. 2023). Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa: (1) Bulukumba menjadi sangat relevan terhadap isu pariwisata pasca *Covid-19*, dimana sektor ekonomi pariwisata bulukumba yang paling terpukul oleh pandemi *Covid-19*, (2) Belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba yang berkaitan dengan penelitian pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba.

Waktu pelaksanaan penelitian akan berlansung dua bulan dengan durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini adalah mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani & Hum 2014).

Penggunaan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *covid-19* di Bulukumba. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjalankan wawancara mendalam, analisis dokumen, pengamatan langsung, dan pengembangan studi kasus untuk menangkap aspek-aspek subjektif seperti persepsi, nilai, sikap, dan kebijakan yang sulit diukur dengan angka.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Kim et al. 2017). Dalam penelitian deskriptif, peneliti berfokus pada menggambarkan dan menguraikan fenomena atau situasi yang telah di alami informan. Penelitian deskriptif tentang pendekatan partisipatif multi *stkaeolder* dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan menyajikan gambaran umum serta melakukan pengamatan dari suatu penelitian. Maka dari itu penelitian ini melibatkan kegiatan lapangan dan observasi langsung terhadap subjek penelitian.

C. Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian Pendekatan Partisipatif *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sumber data. Dalam penelitian ini dipilihlah informan sesuai dengan kriteria tertentu, kriteria yang akan digunakan (Deriyanto et al., 2018) adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Unsur
1	Idiawaty, S.S., M.M	IW	Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA)	Pemerintah
2	Masykur Amin	MA	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) Dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bulukumba.	
3	Muhammad Yusuf Muhmamadiyah	MY	Ketua Seksi Umum Bank SULSELBAR Bulukumba	Bisnis
4	Ayu Octaviany Puspitasari, S.A.B	AP	<i>Claim Service Assitant Manager</i> PT Asuransi Jasaraharja Putera.	
5	A. Aryono, S.IP., M.M	AY	Ketua Komunitas Generasi Pesona Indonesia (GENPI)	Komunitas
6	H. Safiuddin, S.Sos	SF	Ketua Komunitas Masyarakat Sadar Wisata (MASATA).	
7	Dr. A. Hasbi, M.M., CHE	AH	Ketua Program Studi Tata Hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR)	Akademisi
8	Andi Azisul Haq	AA	Wakil Direktur Simpul Indonesia.	Media

Pemilihan informan dalam tabel di atas didasarkan pada kriteria yang mempertimbangkan *multi-stakeholder* yang terlibat dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 atau individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari mereka akan akurat dan berharga bagi penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling krusial dalam proses penelitian. Pentingnya metode pengumpulan data dalam konteks penelitian tidak bisa diabaikan, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2010). Pengumpulan data dapat diterapkan melalui beragam sumber dan metode (Adlini et al., 2022) meliputi:

1. *Observasi* (Pengamatan Lansung)

Teknik pengumpulan data melalui *observasi* merupakan tindakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap tertentu

2. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah pendekatan interaktif di mana peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan.

Wawancara melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya dan seringkali berlangsung dalam format tanya-jawab

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi melibatkan pemanfaatan berbagai jenis dokumen atau rekaman tertulis, seperti laporan, catatan, dokumen perusahaan, buku, jurnal ilmiah, dan materi lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dokumen merujuk pada rekaman mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen bisa berwujud teks tertulis, gambar, atau karya bersejarah dari individu tertentu.

E. Teknik Pengabsahan Data

Metode validasi data (pengabsahan data) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian memiliki keandalan dan keabsahan. Ini melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk memverifikasi apakah data yang terkumpul mencerminkan dengan akurat situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi, yang melibatkan perbandingan antara berbagai sumber data yang berbeda. Secara esensial, triangulasi adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Rahardjo, 2010).

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik sebagai metode yang dilakukan dengan mengonfirmasi data kepada sumber yang sama, namun dengan

pendekatan yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian divalidasi melalui observasi dan pengumpulan dokumen.

2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pendekatan di mana peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda untuk mengonfirmasi atau memverifikasi suatu temuan atau hasil penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berguna untuk memperkuat keabsahan data yang terkait dengan perkembangan proses dan perilaku manusia, karena pola perilaku manusia cenderung berubah seiring waktu. Untuk memastikan bahwa data yang berasal dari observasi memiliki kualitas yang kuat, peneliti perlu melaksanakan lebih dari satu sesi pengamatan, daripada hanya mengandalkan satu pengamatan tunggal.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Rijali, 2019).

Menurut Milles, Huberman, dan Saldana dalam analisis data kualitatif terdapat tiga proses yang harus di perhatikan (Chusnia et al. 2017), yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada tahapan merangkum sedemikian rupa data-data yang telah terkumpul, seperti catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai materi empiris lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca covid-19 di bulukumba.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan merapikan informasi dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan mengenai partisipatif multi stltakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca covid-19 di Bulukumba.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Salah satu tahap penting dalam analisis adalah melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten selama proses penelitian, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang meyakinkan dan dapat dipercaya.

BAB IV

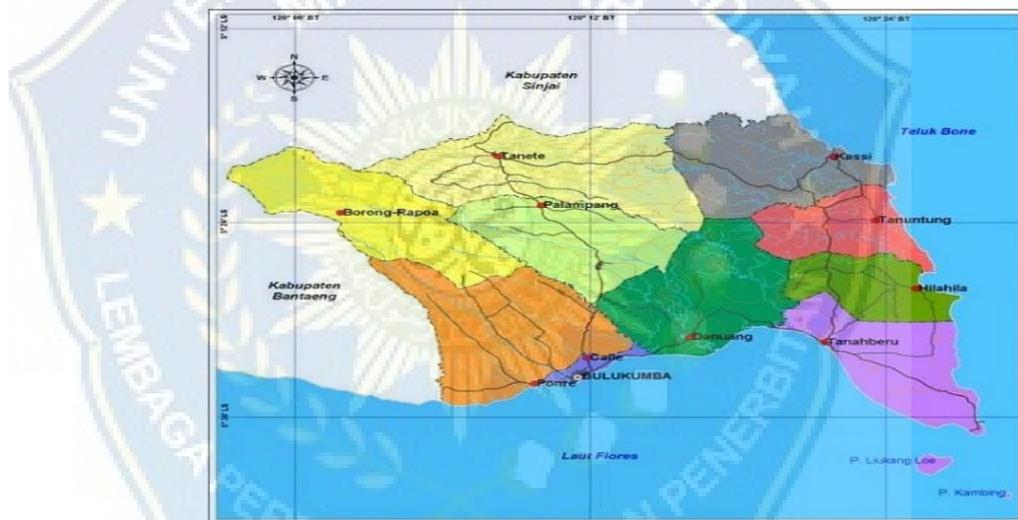
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

a. Letak Geografi dan Letak Demografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba yang terletak di sebelah selatan jalur Sulawesi, dengan jarak sekitar 153 km dari kota Makassar merupakan salah-satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia



Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba

Sumber: <https://bulukumbakab.bps.go.id/>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2023 Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.170,10 km² atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Melihat dari sisi dimensi wilayah, kecamatan Gantarang dan Bulukumpa menonjol

sebagai dua wilayah terluas, masing-masing mencakup luas 175,84 km² dan 173,63 km², yang bersama-sama menyumbang sekitar 30 persen dari total luas Kabupaten dan kecamatan terkecil adalah Ujung Bulu yang merupakan point of center Kabupaten Bulukumba dengan wilayah seluas 14,63 km² atau sekitar 1 persen dari keseluruhan wilayah.

Secara geografis, Wilayah Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20' Lintang Selatan - 5°40' Lintang Selatan dan 119°58' Bujur Timur - 120°28' Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya meliputi:

Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan: Laut Flores

Sebelah Timur: Teluk Bone

Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng

Kawasan pesisir Kabupaten Bulukumba memiliki ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan, yakni: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. Sementara itu, wilayah yang bergelombang dengan ketinggian antara 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut meliputi sebagian wilayah Gantarang, Kindang, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Rilau Ale. Hampir 95,4 persen wilayah perbukitan di Kabupaten

Bulukumba berada pada ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut yang membentang dari Barat ke Utara meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale dengan tingkat kemiringan tanah 0 sampai 400 yang berpotensi sebagai lahan non-urban atau dapat difungsikan sebagai kawasan lindung.

Menurut analisis Smith-Ferguson, yang mengukur tipe iklim berdasarkan bulan basah dan bulan kering, Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan iklim lembap atau agak basah dengan suhu rata-rata antara 23,82 °C hingga 27,68 °C. Kisaran suhu ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan proyeksi penduduk interm tahun 2020-2023 mencapai 440.090 jiwa, terdiri dari 214.679 jiwa laki-laki dan 225.411 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, tercatat bahwa penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan sebesar 0,43 persen per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,24.

Di Kabupaten Bulukumba, terdapat dua bahasa daerah yang umum digunakan, yakni Bahasa Bugis dengan dialek Bulukumba, dan Bahasa Konjo yang terdiri dari Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa

Konjo pegunungan. Bahasa Konjo termasuk dalam sub-bahasa Makassar, memiliki perbedaan dalam pengucapan dan sebagian kata-kata dibandingkan dengan Bahasa Makassar yang umumnya dipakai. Meski begitu, menariknya, terdapat beberapa kata dalam Bahasa Konjo yang memiliki kesamaan dengan Bahasa Bugis. Secara budaya dan bahasa, Kabupaten Bulukumba dapat dianggap sebagai wilayah transisi atau titik pertemuan antara budaya Bugis dan Makassar. Masyarakatnya memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa daerah yang umum digunakan di Sulawesi Selatan

b. Sejarah Kabupaten Bulukumba

Kata Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa yang pada tingkat dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Asal-usul penamaan ini memiliki latar belakang mitologis yang berasal dari bahasa Bugis, yaitu gabungan kata Bulu'ku dan Mupa. Dalam bahasa Indonesia, gabungan kata ini dapat diartikan sebagai masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini muncul pertama kali pada abad ke-17 Masehi selama periode perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi, yakni kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang disebut Tanahkongkong, utusan dari Raja Gowa dan Raja Bone bertemu untuk melakukan perundingan. Mereka menjalankan proses negosiasi dengan damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Pihak kerajaan gowa mengklaim Bangkeng Buki yang secara harfiah berarti kaki bukit merupakan deretan lereng bukit dari

Gunung Lompo Battang sebagai batas kekuasaannya dari Kindang hingga wilayah Timur. Namun, kerajaan Bone tetap bersikeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya dari Barat hingga Selatan.

Peristiwa tersebut menjadi awal munculnya frasa dalam bahasa Bugis yang disebut Bulukumupa. Kemudian, melalui perubahan dalam tingkatan dialek tertentu, frasa ini mengalami proses bunyi menjadi Bulukumba. Diceritakan bahwa sejak saat itu, nama Bulukumba mulai dikenal, dan hingga saat ini resmi digunakan sebagai nama sebuah kabupaten.

Pemilihan nama Kabupaten Bulukumba dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Langkah ini diikuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 28 Maret 1994 dengan diselenggarakannya seminar sehari, yang dihadiri oleh narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada, seorang ahli sejarah dan budaya.

Hasil dari seminar tersebut adalah penetapan hari jadi Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Dari segi legalitas, status Kabupaten Bulukumba sebagai daerah tingkat II resmi diakui setelah DPRD Kabupaten Bulukumba menetapkan Lambang Daerah

pada tanggal 4 Februari 1960. Pelantikan Bupati Pertama, Andi Patarai, kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1960.

Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai yakni 128 km sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim tidak heran jika kabupaten ini dikenal sebagai Butta Panrita Lopi, yang artinya merupakan tempat para ahli pembuat perahu oleh karena itu, peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, menjelaskan bahwa daerah Bulukumba ini diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dengan letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki beragam suku, budaya, dan objek wisata lainnya.

Spot wisata bahari yang eksotis tersebar di Kecamatan Bontobahari di antaranya pantai pasir putih Tanjung Bira dan Tebing Apparalang, sementara di Kecamatan Bontotiro ada Pantai Samboang dengan ombaknya yang tenang. Wisata alam yang menarik yakni ketinggian Desa Kahayya dan juga air terjun Na'na di Kelurahan Borong Rappoa yang masing-masing berada di Kecamatan Kindang. Terdapat wisata budaya Tanah Toa, Kajang yang terkenal dengan pakaian serba hitamnya, sehingga menarik untuk dikunjungi dunia nasional maupun internasional.

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA)

a. Profil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba

Pasal 18 UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kegiatan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian "mengelola" dalam konteks ini mencakup perencanaan, organisasi, dan pengendalian seluruh aspek kepariwisataan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) yang berlokasi di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92517, Indonesia merupakan salah satu instansi yang memegang peranan penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Tugas utamanya mencakup manajemen daya tarik wisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, yang merupakan bagian dari tupoksi Dinas Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, dinas ini juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya pemulihan sektor pariwisata.

Tugas dan fungsi dinas pariwisata tertuang dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 136 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, yaitu :

- 1) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab melaksanakan kebijakan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Seluruh tenaga kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga wajib menjalankan tugas sesuai peraturan, menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, dan efisiensi, serta mematuhi aturan perundang-undangan untuk transparansi dan akuntabilitas
- 3) Menjalin kerjasama dengan para *multi-stakeholder* terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

b. Visi Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba

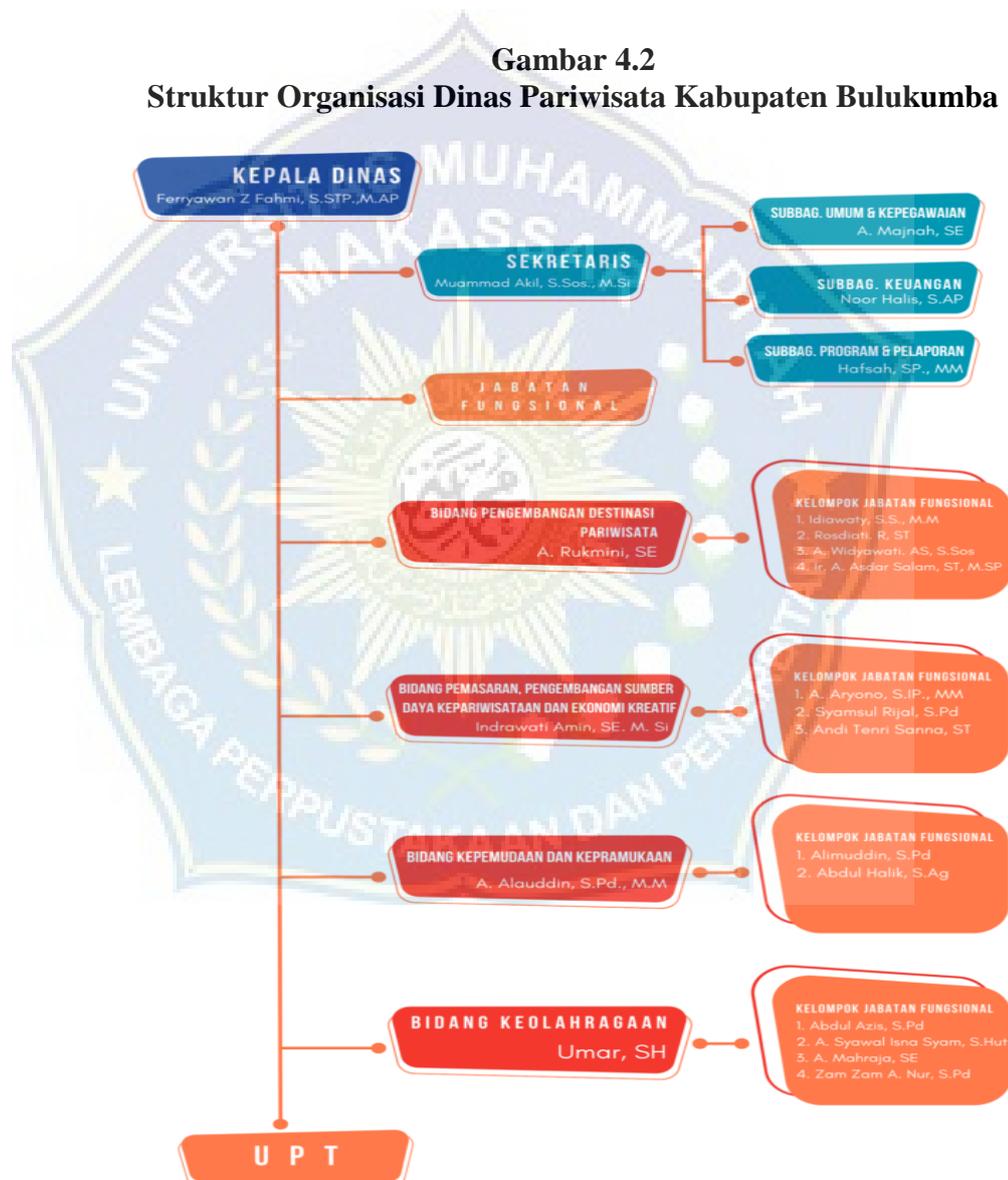
Visi dan Misi OPD merupakan pedoman OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi adalah pandangan ideal ke depan yang ingin diwujudkan dalam kurung waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai antisipasi perkembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Dengan memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 serta tantangan pembangunan kepariwisataan ke depan maka dirumuskan visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah *“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”*. Demi mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat
- 2) Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
- 3) Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
- 4) Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
- 6) Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
- 7) Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
- 8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
- 9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis investasi dan Bantuan Pemerintah
- 10) Membina Generasi Muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
- 11) Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 12) Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

c. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, maka struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba



B. Hasil Penelitian Tentang Pendekatan Partisipatif *Multi-stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba

Upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba pasca *covid-19* menjadi tugas utama Dinas Pariwisata tetapi dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan beberapa unsur *pentahelix* pariwisata. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang menjabat sebagai Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam mengelola destinasi pariwisata yang ada di Bulukumba tidak dapat bekerja sendiri, namun memerlukan campur tangan dari para *multi stakeholder*, oleh karena itu kami menggunakan konsep *pentahelix pariwisata* yang didalamnya ada unsur pemerintah, bisnis, komunitas masyarakat, akademisi dan media. Para *stakeholder* ini memiliki tupoksi masing-masing dalam pemulihan dan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba” (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba menegaskan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata memerlukan kolaborasi *multi-stakeholder*. Mereka menerapkan konsep *pentahelix* Pariwisata yang melibatkan pemerintah, bisnis, komunitas masyarakat, akademisi, dan media. Setiap *stakeholder* memiliki peran khusus dalam upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Berikut tabel unsur-unsur pariwisata yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata:

Tabel 4.1

Unsur-Unsur *Pentahelix* Pariwisata

NO	Unsur-Unsur	Lembaga
1	Pemerintah	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
2	Bisnis	PT Asuransi Jasaraharja Putera
		Bank SULSELBAR
3	Komunitas	Generasi Pesona Indonesia (GENPI)
		Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
4	Akademisi	Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR)
5	Media	Simpul Indonesia
		Radar Selatan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan beserta regulasi, bisnis/pihak swasta secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, komunitas bertugas senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata melalui penerapan sadar wisata, menumbuhkan kembangkan kreatifitas yang melahirkan kreasi baru agar menjadi daya tarik wisata. Peranan akademisi memberikan sumbangsi pengetahuan mengenai riset-siset yang telah mereka lakukan tentang

fenomena-fenomena yang terjadi. Media massa memberikan informasi yang lebih cepat dan murah dalam mengakses perkembangan pariwisata.

Berikut untuk memperjelas hasil penelitian mengenai pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata peneliti menggunakan indikator pendekatan partisipatif yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi :

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan menjadi pilar utama dalam upaya pemulihan pariwisata pasca *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten ini, seperti banyak daerah lain di seluruh dunia, mengalami dampak serius akibat pandemi yang melanda sejak tahun 2019. Dalam konteks ini, indikator pendekatan partisipatif menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya pemulihan pariwisata yang inklusif.

Proses partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bulukumba adalah melakukan sebuah pertemuan atau mengadakan rapat. Hal ini, menjadi dasar untuk melakukan kerjasama dengan memperhitungkan pandangan dan kontribusi dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Adapun wawancara dengan informan perwakilan Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga yang menjabat dibagian Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sebelum melakukan kerjasama, pertemuan menjadi langkah awal yang tak terhindarkan, pasti ada pertemuan intens sebelum kita menetapkan MoU, kita ke tempat mereka atau mereka ke tempat kami,” (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Informan di atas menyatakan bahwa pertemuan intens ini sebenarnya menjadi pondasi dalam proses penetapan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan formal. Pertemuan intens ini menciptakan *platform* di mana para *multi-stakeholder* dapat saling memahami, menyampaikan ide, dan merinci peran serta dampak yang diharapkan dari kerjasama tersebut. Hal ini menciptakan kesepahaman bersama dan memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan masukan dari semua pihak terlibat.

Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ini juga diperkuat dengan wawancara bersama ketua komunitas Generasi Pesona Indonesia (GENPI). Berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam pengambilan keputusan GENPI beberapa kali rapat dengan Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya termasuk komunitas MASATA, dalam rapat tersebut kami memberikan saran ataupun masukan sesuai dengan tupoksi kami. Seperti: mengusulkan pelatihan yang mendukung pemulihan *covid-19* dan melakukan promosi-promosi guna menarik perhatian wisatawan”. (Wawancara bersama, AY. Pada 17 Januari 2024).

Wawancara dengan ketua komunitas GENPI menjelaskan bahwa dinas pariwisata memberikan ruang dalam proses pengambilan keputusan. Selain komunitas GENPI Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) tidak kalah pentingnya dalam perumusan kebijakan. Keikutsertaan MASATA dalam Partisipatif pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk membentuk dasar kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat serta membentuk masyarakat untuk sadar akan wisata dan budaya yang ada di Bulukumba. Seperti yang disampaikan ketua komunitas Masyarakat Sadar Wisata (MASATA). Berikut kutipan wawancaranya:

“Pada hakikatnya MASATA bukan kita megambil keputusan cuman kita memberikan sumbansi saran kepada pemerintah tentang pemulihan pariwisata di Bulukumba, sebab MASATA itu adalah kepanjangan dari Masyarakat Sadar Wisata, bagaimana kembali menyadarkan masyarakat tentang kepariwisataan itu sendiri, dan MASATA memberikan dorongan kepada pemerintah tentang hal-hal yang terjadi di lapangan hari ini. Sebab tidak menuntut kemungkinan pemerintah tidak mendapatkan hal-hal yang terjadi tentang pariwisata di lapangan tetapi dengan hadirnya komunitas MASATA yang juga menjalin kerjasama dengan para komunitas pariwisata dan para kelompok-kelompok penggiat wisata yang ada di daeah Bulukumba untuk menggerakkan penggiat pariwisata.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan Informan diatas, ditekankan bahwa MASATA bukanlah lembaga pengambil keputusan, melainkan sebagai Masyarakat Sadar Wisata. Peran utama MASATA adalah memberikan sumbangan saran kepada pemerintah terkait pemulihan pariwisata di Bulukumba yang fokus pada kesadaran masyarakat akan pariwisata, MASATA berupaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sektor ini.

Komunitas ini juga berperan memberikan dorongan kepada pemerintah dengan menginformasikan realitas di lapangan.

Melihat dari sisi partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengambilan keputusan untuk pemulihan pariwisata peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Keikutsertaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengambilan keputusan adalah secara proaktif mengusulkan konsep atau ide-ide yang berfokus pada lingkungan sekitar pariwisata seperti penanggulangan sampah yang ada di sekitar tempat wisata, sumbangan ide-ide atau konsep ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pariwisata”. (Wawancara bersama, MA. Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, mengungkapkan bahwa keikutsertaan dinas tersebut dalam pengambilan keputusan pariwisata bertujuan mengusulkan konsep dan ide-ide yang berfokus pada lingkungan. Khususnya menyoroti upaya penanggulangan sampah di sekitar tempat wisata. Selanjutnya, untuk melihat partisipasi bisnis dalam pengambilan keputusan peneliti mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba.

“Untuk pengambilan keputusan kami hanya memberikan saran dan penentu keputusan tetap dikembalikan kepada pemerintah”. (Wawancara bersama MM. Pada 17 Januari 2024).

Lebih lanjut *Claim Service Assitant Manager* PT Asuransi Jasaraharja Putera mengungkapkan hal yang serupa mengenai wawancara dengan unsur bisnis di atas. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi proses pengambilan keputusan jasaraharja contohnya pada saat pemungutan premi asuransi yang ada di Dinas Pariwisata atau pengambilan keputusan atau kebijakan pada saat claim. Kalau untuk proses pemulihan itu keputusan ada Dinas Pariwisata kami hanya memberikan masukan serta saran bagaimana pemulihan kedepannya dan ini sesuai dengan tupoksi lembaga kami dan apapun bentuk perminta tolongan Dinas Pariwisata kami seberusaha mungkin membantu”. (Wawancara bersama, AP. pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan unsur bisnis, dapat disimpulkan bahwa partisipasi unsur bisnis dalam pengambilan keputusan untuk pemulihan pariwisata yang dilakukan hanya berbentuk saran dan ide-ide selebihnya untuk penetapan keputusan dikembalikan kepada pemerintah. Peneliti juga mewawancari ketua program studi tata hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut kutipan wawancaranya:

“Politeknik Pariwisata kan di bawa kementerian pariwisata, jadi secara langsung kita tidak mengambil keputusan tetapi secara tidak langsung kita memberikan masukan atau sumbansi saran berdasarkan hasil analisis, hasil survey, hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang *Covid* kemudian diberikan kepada pemerintah setempat untuk mengambil keputusannya”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari 2024).

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas, unsur akademisi berperan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan saran dan ide-ide berbasis riset kepada Dinas Pariwisata terkait upaya pemulihan dan pengelolaan pariwisata. Untuk memperkuat bahwa semua *multi-stakeholder* turut andil dalam

pengambilan keputusan peneliti juga mewawancarai wakil direktur Simpul Indonesia. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk pengambilan keputusan kami diikutsertakan namun, kami sebatas memberikan saran atau ide-ide yang berhubungan dengan tugas kami, jadi untuk penetapan keputusan kembali ke Dinas Pariwisata itu sendiri”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur media, partisipasi dalam pengambilan keputusan Simpul Indonesia hanya memberikan saran atau ide-ide yang berhubungan dengan tupoksinya dan keputusan akhir tetap berada di tangan Dinas Pariwisata.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Keberhasilan pendekatan partisipasi *multi-stakeholder* pada pelaksanaan adalah partisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja, kebijakan, atau kesepakatan terkait pemulihan pariwisata. Untuk melihat bentuk partisipasi pelaksanaan atau bentuk kerjasama para *multi-stakeholder* dari hasil partisipasi keputusan yang dilakukan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan unsur pemerintah yang menjadi kunci dalam pengelolaan pariwisata yaitu informan yang menjabat sebagai Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bentuk partisipasi Dinas Pariwisata dengan para *multi-stakeholder* yang kami bangun adalah bentuk kerja sama dalam membuat suatu kebijakan, proyek, dan membuat nota kesepakatan kerjasama atau sering disebut MoU yang bertujuan dalam pemberdayaan

masyarakat dan pemberdayaan SDM, serta pemulihan atau pengembangan pariwisata berkelanjutan.”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Informan kembali menjelaskan contoh bentuk kerjasama dengan para *multi-stakeholder* (pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi dan media). Berikut kutipan wawancaranya:

“Adapun salah-satu contoh bentuk bantuan atau bentuk kerjasama dengan pemerintah, bisnis, komunitas, akademis dan media yaitu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pemerintah terkait bantuan tenaga pembersih dan alat pembersih untuk obyek wisata yg punya volume sampah banyak, Jasaraharja terkait asuransi kecelakaan bagi pengunjung kawasan wisata Bira, Bank SULSELBAR berupa bantuan kendaraan roda 3 pengangkut sampah, MASATA dan GENPI terkait kegiatan promosi wisata dan pengembangan kualitas SDM kepariwisataan, POLTEKPAR terkait penelitian kepariwisataan, Simpul Indonesia sebagai penyedia berita online”. (Wawancara, bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa terdapat berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan para *multi-stakeholder* salah satunya adalah membuat nota kesepakatan (MoU) bentuk kerjasama ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan SDM serta pemulihan pariwisata Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan para *multi-stakeholder* peneliti kembali menanyakan tentang partisipasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan unsur pemerintah atau Operasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tingginya jumlah kunjungan pada saat pertamakali dibukanya pariwisata Bulukumba setelah tutup 3 bulan akibat Covid-19 menimbulkan dampak positif ke ekonomi pariwisata namun disisi lain menimbulkan dampak negative berupa sampah dari kegiatan wisatawan. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat bergerak sendiri

namun membutuhkan kerjasama dengan para *multi-stakeholder*. Sala-satu *stakeholder* yang sangat berkaitan dengan kebersihan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak kami telah bisa mengendalikan sampah setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) termasuk pelibatan sejumlah *stakeholder* lainnya juga turun melakukan penanganan dan pelayanan di Kawasan Wisata”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba diperkuat dengan wawancara bersama kepala bidang pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba.

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Pariwisata adalah pada musim-musim tertentu, adakalanya Dinas Pariwisata tidak dapat mengendalikan sampah yang di akibatkan jumlah pengunjung yang tinggi, oleh karena itu kami menurunkan armada, tim, serta sarana dan prasarana kami untuk mendukung upaya bersama dalam menjaga kebersihan destinasi pariwisata di Kabupaten Bulukumba”. (Wawancara bersama, MA. Pada 17 Januari 2024).

Wawancara dengan kedua belah pihak diatas menyatakan pertama kali dibukanya pariwisata Kabupaten Bulukumba jumlah kunjungan warga lokal sangat membludak hal ini menyebabkan perekonomian Pariwisata Bulukumba pulih namun dari tingginya jumlah kunjungan pariwisata menimbulkan eksternalitas negatif berupa sampah dari kegiatan wisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat berperan penting di dalam pengelolaan pariwisata yang ada di bulukumba.

Untuk memperkuat pernyataan Dinas Pariwisata mengenai partisipasi unsur bisnis dalam pelaksanaan pemulihan pariwisata

peneliti mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSERBAR Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan kami dari Bank SULSELBAR mempermudah Dinas Pariwisata dalam penyetoran dana hasil destinasi pariwisata di Bira, selain itu kami membangun fasilitas ATM Bank SULSELBAR untuk mempermudah akses para wisatawan dalam melakukan transaksi di Bira. Kami juga memberikan pemerintah kabupaten bulukumba 10 unit motor pengangkut sampah”. (Wawancara bersama, MY. Pada 17 Januari 2024).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai *Claim Service Assitant*

Manager PT Asuransi Jasaraharja. Berikut kutipan wawancaranya:

“Partisipasi dalam pelaksanaan itu kita dalam bentuk perjanjian kerja sama atau MoU. Ketika ada yang terjadi kecelakaan dalam objek pariwisata itulah fungsinya kami menjamin hal tersebut. jadi kami mengcover seluruh pengunjung yang ada di objek pariwisata Tanjung Bira dan sekitarnya”. (Wawancara bersama, AP. Pada 24 Januari 2024).

Melalui wawancara dari unsur bisnis di atas, perwakilan Bank SULSELBAR menyatakan partisipasinya dalam pelaksanaan pemulihan pariwisata Bira adalah memfasilitasi pembayaran debit dan mereka juga memberikan bantuan prasarana sedangkan PT asuransi Jasaraharja menegaskan bahwa bentuk kerjasama dengan Dinas Pariwisata berupa perjanjian kerjasama atau MoU.

Untuk melihat partisipasi komunitas dalam pelaksanaan peneliti mewawancarai unsur komunitas, yaitu ketua komintas Generasi Pesona Indah (GENPI) yang ikut andil dalam pemberian ide dan saran pada saat pengambilan keputusan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan adalah kami dengan dinas pariwisata itu membuat perjanjian kerjasama MoU tentang penyebarluasan informasi kegiatan kepariwisataan dan ekonomi

kreatif. Sistem kerja kami secara online dan offline. Untuk kegiatan online kami mempromosikan semua informasi tentang destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sedangkan untuk kegiatan offline kami melakukan pelatihan jurnalistik kepariwisataan dan mengadakan bimbingan teknis pemasaran digital, selain itu kami juga sering di ikut sertakan dalam event-event kepariwisataan salah satunya yaitu, festival phinisi”. (Wawancara bersama AY. Pada 17 Januari 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua komunitas Masyarakat Sadar Wisata sebagai organisasi non profit. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan adalah kami ada memberikan pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan kepada kelompok-kelompok UMKM atau BUMDES yang ada di desa untuk dapat menggerakkan kembali yang punya destinasi wisata itu dan kita bantu cara berfikir bagaimana mereka bisa bergairah kembali untuk menjadikan daerahnya sebagai tempat tujuan wisata, jadi kami lebih kepada pengembangan SDM.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Wawancara dengan unsur komunitas di atas menyatakan bahwa, bentuk partisipasi komunitas GENPI dalam pelaksanaan membuat MoU dengan Dinas Pariwisata tentang penyebaran informasi pariwisata. Sementara komunitas SAMATA fokus pada pengembangan SDM, memberikan pelatihan kepariwisataan kepada UMKM dan BUMDES untuk meningkatkan gairah dan menjadikan daerahnya destinasi wisata yang menarik. Selanjutnya, untuk melihat bentuk partisipasi unsur akademisi dalam pelaksanaan peneliti mewawancarai ketua program studi tata hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau bentuk partisipasi Politeknik Pariwisata Makassar dalam pelaksanaan adalah membuat MoU dengan Dinas Pariwisata tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan kepariwisataan Bulukumba”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari 2024)

Politeknik Pariwisata Makassar aktif berpartisipasi dalam pemulihan pariwisata Bulukumba melalui MoU tentang kerja sama pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini memastikan adanya bimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, yang menjadi kontribusi penting dalam pemulihan pariwisata. Selanjutnya, untuk melihat bentuk partisipasi unsur media dalam pelaksanaan peneliti mewawancarai wakil direktur Simpul Indonesia. Berikut kutipan wawancaranya:

“Mengenai kerjasama apapun yang dilakukan DISPARPORA kita akan lakukan pemberitaan dan simpul Indonesia memiliki portal berita”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Dalam wawancara dengan informan diatas disampaikan bahwa Simpul Indonesia sebagai layanan berita online berkomitmen memberitakan setiap kegiatan kepariwisataan.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi *multi-stakeholder* dalam manfaat mencerminkan sejauh mana berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, dan media aktif berkontribusi dan mendapatkan keuntungan kebijakan atau program yang dihasilkan dari partisipasi pengambilan keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan informan yang menjabat di bagian Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Sebelum mengambil keputusan dari ide-ide dan masukan dari para *stakeholder* untuk melakukan kerja sama tentunya kita juga melihat *win-win solution* atau manfaat yang kami dapatkan dan mereka dapatkan. Dengan adanya kolaborasi para *multi-stakeholder* tentunya yang didapat Disparpora itu banyak sekali baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang kelihatan sangat dirasakan yaitu adanya peningkatan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) dan secara tidak langsung kami mendapatkan impact dari bentuk kerja sama baik dari kerjasama antar pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, unsur bisnis, Komunitas, dan media”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas, mengatakan bahwa Partisipasi dalam manfaat memastikan bahwa hasil dari keputusan yang diambil memberikan dampak positif secara merata kepada semua pihak yang terlibat. Melihat dari partisipasi unsur pemerintah selain Dinas Pariwisata peneliti juga mewawancarai kepala bidang pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kitakan estetika keindahan kebersihan, artinya kalau bersih ki pariwisata orang akan tertarik, dan mengundang orang untuk belajar mengenai cara pemerintah mengelola sampah artinya pengunjung yang datang tidak hanya rekreasi tapi belajar, dan itu yg di inginkan Dinas Lingkungan Hidup”. (Wawancara bersama, MA. Pada 17 Januari 2024).

Dalam wawancara di atas, Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwa keindahan dan kebersihan merupakan kunci utama dalam menarik minat pengunjung dengan tujuan melakukan kerjasama ingin menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan rekreasi,

tetapi juga menjadi tempat pembelajaran, hal ini yang menjadi keinginan dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melihat partisipasi unsur bisnis dalam pengambilan manfaat, peneliti mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Manfaat yang kami dapatkan dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah salah satunya adalah keberadaan ATM di tempat pariwisata juga memberikan manfaat kepada Bank Sulsebar dalam meningkatkan pangsa pasar. Memudahkan akses wisatawan terhadap layanan perbankan, bank dapat menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan aktivitas transaksi di ATM. Ini menciptakan peluang untuk memperluas jaringan layanan perbankan di kawasan pariwisata dan meningkatkan *brand awareness* bank di kalangan wisatawan”. (Wawancara bersama, MM. Pada 17 Januari 2024).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai *Claim Service Assitant Manager* PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai unsur bisnis. Berikut kutipan wawancaranya:

“Manfaat dari bentuk kerja sama yang kita bangun dengan Dinas Pariwisata ini kita itu jadi punya relasi yang luas, dimana Bulukumba menjadi objek pariwisata terbesar di Sulawesi itu menjadi ajang kita juga untuk dikenal masyarakat luas dan kami bisa memasarkan produk kami lainnya”. (Wawancara bersama, AP. Pada 24 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas dengan unsur bisnis menyatakan, partisipasi Bank SULSELBAR dalam pengambilan manfaat seperti penempatan ATM di destinasi pariwisata memberikan keuntungan finansial bagi bank sedangkan manfaat yang dirasakan PT Jasaraharja adalah terjalinnya relasi luas yang diperoleh dari kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Kesimpulannya, manfaat dari bentuk partisipasi keputusan lalu terjalin sebuah kerjasama tidak hanya meningkatkan

aktivitas bisnis, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan wisatawan.

Untuk melihat bentuk partisipasi unsur komunitas dalam pengambilan manfaat peneliti mewawancarai dua komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba yaitu Generasi Pesona Indonesia (GENPI) dan Masyarakat Sadar Wisata (MASATA). Berikut kutipan wawancaranya:

“Manfaat yang kami dapatkan dari bentuk kerjasama yang dijalin adalah kami punya *privilege* untuk terlibat aktif dalam event-event kepariwisataan dan komunitas GENPI juga semakin dikenal oleh masyarakat luas”. (Wawancara bersama, AY. Pada 17 Januari 2024).

Komunitas selanjutnya adalah MASATA, peneliti melakukan wawancara dengan ketua komunitas MASATA. Berikut kutipan wawancaranya:

“Manfaat yang kami dapatkan lebih memikirkan manfaat untuk masyarakat.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan unsur informan peneliti menyimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan komunitas GENPI adalah mendapatkan hak istimewa untuk terlibat dalam event-event kepariwisataan, meningkatkan visibilitas komunitas, dan mendapat pengakuan masyarakat. Sementara itu, komunitas MASATA sebagai organisasi non profit lebih menekankan manfaat kebijakan atau program menguntungkan masyarakat.

Untuk melihat bentuk partisipasi unsur akademisi dalam pengambilan manfaat peneliti mewawancarai ketua program studi tata

hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau manfaat yang kita dapatkan adalah memperluas kerja sama kita , contoh misalnya dinas pariwisata membuka kebutuhan tenaga kerja tidak mungkin lari kemana-mana mereka sudah tau ada kami yang lebih kompeten untuk kepariwisataan artinya kami mendapatkan *benefit* tersalurnya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari 2024).

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan POLTEKPAR dalam setiap proses partisipasi termasuk dalam pengambilan keputusan hingga menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata mendapatkan manfaat seperti memperluas jaringan kerja sama dan memberikan manfaat berupa kesempatan kerja bagi mahasiswa. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur media dalam pengambilan manfaat peneliti mewawancarai wakil direktur Simpul Indonesia.

“Kalau berbicara manfaat banyak sekali manfaat yang di dapatkan dari kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga salah satunya yaitu mudahnya anggota simpul mengakses tempat wisata yang di naungi DISPARPORA untuk pengambilan berita dan gambar, mudahnya akses informasi tentang perkembangan dan kemajuan pariwisata di Bulukumba, serta memberikan bahan informasi untuk disebarluaskan ke masyarakat”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kolaborasi ini membuka jalur efektif untuk diseminasi informasi kepada masyarakat. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga memberikan manfaat signifikan kepada Simpul Indonesia, termasuk kemudahan akses anggota simpul dalam mendapatkan informasi, berita, dan gambar terkini seputar pariwisata Bulukumba.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipatif dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya atau program yang sudah berjalan. Keberhasilan evaluasi dapat diukur dari sejauh mana pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media secara bersama-sama terlibat dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam pengevaluasian sekarang kita sudah terbantu dengan adanya UPTD Pengelola Obyek Wisata dimana tugas mereka adalah melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata namun hal ini tidak membuat kita tidak turun langsung kelapangan. Dinas pariwisata biasa melakukan evaluasi *by data* maksudnya selalu melakukan pengawasan secara intensif dengan melakukan pengawasan kelapangan.”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Melalui wawancara di atas informan menyatakan bahwa, meskipun telah dibangun UPTD Pengelola Obyek Wisata yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan administratif dalam mendukung evaluasi dengan perencanaan dan pelaporan di wisata Bira, Dinas Pariwisata tetap aktif terlibat dalam pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program atau kebijakan dari hasil partisipasi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan

Melihat dari partisipasi unsur pemerintah selain Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* peneliti juga mewawancarai kepala bidang pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan

peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba yang menyuarakan ide dalam pengambilan keputusan terhadap pemulihan pariwisata. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada target ada proses kita selalu evaluasi sejauh mana progres dari kerjasama dan sejauh mana keberhasilannya atau tidak, itu sering kita evaluasi”. (Wawancara bersama, MM. Pada 17 Januari 2024).

Melalui wawancara dengan informan di atas, terungkap bahwa evaluasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata berfokus pada sejauh mana progres dan keberhasilan bentuk kerjasama yang dijalin. Untuk melihat partisipasi unsur Bisnis dalam evaluasi, peneliti mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba dan *Claim Service Assitant Manager*. PT Asuransi Jasaraharja Putera. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam proses evaluasi kami dilibatkan di bagian transaksi dana hasil pengunjung karena itu memang yang menjadi ide kami dalam pengambilan keputusan dan menjadi bentuk kerjasama kami yang sesuai dengan tupoksi kami”. (Wawancara bersama, MY. Pada 17 Januari 2024).

Selanjutnya wawancara dengan *Claim Service Assitant Manager* PT Asuransi Jasaraharja Putera. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena di kantor kami orangnya terbatas jadi untuk pengevaluasian kami tidak dapat menempatkan atau mengirim orang kesana jadi kami tidak terlibat secara langsung dalam pengevaluasian. Kami memantau dari jauh terkait dari premi dan sesi klaimnya saja, namun biasanya kami ada pertemuan baik Dinas Pariwisata kesini atau kami kesana membicarakan bagaimana *update* dan kendala-kendala apa yang ada di objek itu yang berkaitan dengan MoU kami”. (Wawancara bersama, AP. Pada 24 Januari 2024).

Wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa keterbatasan personel mengakibatkan keterlibatan jarak jauh dalam

pengevaluasian program kerja yang berfokus pada pemantauan pada premi dan klaim. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur komunitas dalam evaluasi peneliti mewawancarai ketua komunitas Generasi Pesona Indonesia (GENPI). Berikut kutipan wawancarnya:

“Partisipasi dalam evaluasi kami di undang kembali dalam mengevaluasi terkait kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Pariwisata karena tupoksinya gempinya adalah menginfokan ke masyarakat melalui media online jadi mengenai tingkat kepuasan pengunjung di upload gempinya ke media sosial”. (Wawancara bersama, AY. Pada 17 Januari 2024).

Komunitas selanjutnya adalah MASATA, peneliti melakukan wawancara dengan ketua komunitas MASATA untuk melihat sejauh mana bentuk keterlibatan komunitas ini dalam proses evaluasi program kerjasama. Berikut kutipan wawancarnya:

“Karena kami komunitas Masyarakat Sadar wisata (MASATA) yang tupoksinya penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata kami sering di undang oleh Dinas Pariwisata dalam proses pengevaluasian untuk memberikan saran atau masukan dalam menentukan kebijakan bagaimana kedepannya dan apa yang dibutuhkan sehingga tugas kami menyadarkan masyarakat berjalan dengan baik.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan unsur komunitas di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi komunitas mereka kembali diundang oleh Dinas Pariwisata dalam proses evaluasi, GENPI berperan dalam menginformasikan melalui media online, terutama mengenai tingkat kepuasan pengunjung. Sementara itu, MASATA aktif dalam pengevaluasian dengan fokus pada memberikan masukan dan saran untuk kebijakan mendatang. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur akademisi dalam evaluasi peneliti mewawancarai ketua program studi

tata hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut kutipan wawancaranya:

“Biasanya pihak dinas itu memanggil kami untuk membahas mengenai kegiatan kami selanjtnya, jadi kegiatan kami itu berseri. Tahun ini misalnya pelatihan membuat kue nah tahun berikutnya bukan lagi membuat kue tapi bagaimana membuat kemasannya, lalu tahun berikutnya bagaiman memasarkannya. Jadi evaluasinya kami biasa di berapa jumlah kegiatan yang sudah kamilakukan dan kegiatan apa selanjutnya yang akan kita lakukan terkait MoU dengan Dinas Pariwisata”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari 2024).

Kesimpulan wawancara dengan informan diatas adalah Dinas Pariwisata secara berkala memanggil untuk mengevaluasi kegiatan dari unsur akademisi di atas. Evaluasi melibatkan jumlah dan jenis kegiatan yang telah dilakukan serta selanjutnya kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur media dalam evaluasi peneliti mewawancarai wakil direktur Simpul Indonesia. Berikut kutipan wawancaranya:

“Simpul ikut berpartisipasi dalam evaluasi dalam menilai perkembangan wisata Bulukumba melalui pemberitaan tersebut. Menilai dari berapa persen peningkatan animo masyarakat mengenai pemberitaan simpul Indonesia”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan dengan menilai peningkatan animo masyarakat terhadap pemberitaan Simpul Indonesia, menggambarkan dampak positif berita tersebut terhadap kesadaran dan minat masyarakat.

C. Pembahasan Penelitian

Pada bagaian ini, terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian, sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan sebagaimana yang dikemukakan (Fajri, 2022) *multi-stakeholder* seringkali digunakan dalam konteks yang melibatkan para pemangku kepentingan yang beragam dan memerlukan kolaborasi yang kuat diantara mereka.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan Kabupaten Bulukumba dalam pemulihan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dengan menggunakan konsep *pentahelix*, sesuai pernyataan (Hamka et al., 2022) *multi-stakeholder* melibatkan berbagai aktor, maka *pentahelix* sebagai konsep dari *multi-stakeholder* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penggunaan sumber daya yang beragam dalam upaya mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah yang dihadapi. Hal ini juga sejalan dengan gagasan manteri Pariwisata Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc periode 2014-2019 yang tertuang kedalam Peraturan

Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, dan pelayanan pariwisata, serta menciptakan pengalaman berharga dan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat maka diperlukan upaya pengoptimalan peran pengusaha, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media dalam sistem pariwisata.

Covid-19 menjadi fenomena yang kemudian menjadi kajian penelitian ini. Peneliti melihat adanya keunikan dari kondisi pariwisata Kabupaten Bulukumba dan hal ini tidak terlepas dari bentuk partisipasi *multi-stakeholder* dan tentunya didukung oleh indikator teori dari Cohen dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) yang mengkategorikan empat jenis bentuk partisipasi dalam melihat sejauh mana pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* terhadap pemulihan pariwisata pasca *covid-19* di Kabupaten Bulukumba.

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam keputusan menurut Cohen dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) adalah bentuk keterlibatan individu maupun kelompok secara langsung dan tidak langsung dalam menentukan arah kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan kepada semua unsur pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi dan media sejauh mana bentuk partisipasi pengambilan keputusan dalam memulihkan pariwisata pasca *covid-19* di Kabupaten Bulukumba.

Pemulihan menjadi fokus utama semua pihak dengan upaya keras untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang terpukul parah selama *Covid-19*. Promosi destinasi, dukungan keuangan, dan peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi komponen kunci dari pemulihan pariwisata (Herdiana 2020).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait partisipasi *multi-stakeholder* dalam pengambilan keputusan ditemukan bahwa para *multi-stakeholder* terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan secara langsung di pegang oleh Dinas Pariwisata sebagai *stakeholder* yang memiliki power dalam sektor kepariwisataan sebagaimana model *saliance* yang dikembangkan oleh Mitchell, Agle, dan Wood mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan *power*, *urgensi*, dan *legitimacy* dimana, *power* (kekuatan) mengacu pada kemampuan yang dimiliki *stakeholder* dalam penetapan keputusan (Mitchell et al., 1997).

Dinas pariwisata memiliki kewenangan resmi atas pengambilan keputusan di sektor pariwisata, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 136 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga. Selanjutnya untuk Dinas Lingkungan Hidup, PT. Jasaraharja, Bank SULSELBAR, Komunitas MASATA dan GENPI, POLTEKPAR serta Simpul Indonesia terlibat secara tidak langsung dengan memberikan

sumbangan ide dan saran mereka dalam setiap pengambilan keputusan untuk pemulihan pariwisata. Ide dan saran ini tersalurkan melalui rapat formal dan non-formal yang diadakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Gambar 4.3
Rapat Bersama Para *Stakeholder* Pariwisata



Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba, 2021

Gambar di atas adalah rapat membahas pemulihan pariwisata setelah ditutupnya Kawasan Wisata Bulukumba selama 3 bulan dari maret hingga juni yang diadakan Dinas Pariwisata dengan para *stakeholder* di kantor lama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Jl. Lanto Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengumpulkan masukan, gagasan, dan pandangan dari berbagai *stakeholder* terkait bagaimana kebijakan pariwisata yang baik dapat dirancang dan diterapkan untuk menciptakan

kebijakan yang lebih holistik dan mendukung pemulihan pariwisata yang berkelanjutan. Saran dan ide-ide yang disampaikan para *multi-stakeholder* bervariasi sesuai dengan peran dan tupoksi lembaga atau komunitasnya.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keterlibatan aktif *multi stakeholder* dalam menjalankan program, kebijakan, atau kesepakatan hasil dari pengambilan keputusan. Dalam pemulihan pariwisata, peran *multi-stakeholder* ini sangat krusial. Menurut Maryono partisipasi *multi-stakeholder* dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholder* kunci (Dewi et al., 2020).

Dalam indikator ini, peneliti menanyakan kepada para *multi-stakeholder* mengenai bentuk kerjasama yang dijalin dengan Dinas Pariwisata sebagai *stakeholder* kunci dari hasil sumbangan saran dan ide pada saat pengambilan keputusan. Para *stakeholder* dalam wawancara menyatakan bentuk kerjasama yang dijalin bervariasi sesuai dengan tupoksi dari lembaga mereka.

Tabel 4.2
Peran Unsur-Unsur Pariwisata Dalam Menjalinkan Kerjasama
Dengan Dinas Pariwisata

No	Nama Lembaga	Peran	Keterangan
1	Dinas Pariwisata	Berwewenang pada <i>leading sector</i> pariwisata dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan hasil saran dan ide dari partisipasi keputusan para <i>multi-stakeholder</i>	<i>Stakeholder Kunci</i>
2	Dinas Lingkungan Hidup	Menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemulihan pariwisata, khususnya terkait lingkungan.	<i>Stakeholder Sekunder</i>
3	Bank SULSERBAR	Menyediakan fasilitas dalam proses pemulihan Kabupaten Bulukumba, serta pemberian kemudahan dan kenyamanan setiap transaksi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.	<i>Stakeholder Sekunder dan Stakeholder Primer</i>
4	PT. Jasaraharja Putera	Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait asuransi wisatawan.	<i>Stakeholder Primer</i>
5	Komunitas MASATA	Pengembangan kualitas SDM kepariwisataan	<i>Stakeholder Primer</i>
6	Komunitas GENPI	Mempromosikan destinasi wisata	<i>Stakeholder Primer</i>
7	Politeknik Pariwisata Makassar	Melaksanakan pendidikan, pelatihan penelitian, dan pengabdian terkait kepariwisataan.	<i>Stakeholder Primer</i>
8	Simpul Indonesia	Sebagai situs portal online yang menyediakan berita dan informasi yang terpercaya, terkini dan terupdate.	<i>Stakeholder Sekunder</i>

Pada tabel tersebut Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* pariwisata dan regulator, OPD diluar dari kepariwisataan menjadi *stakeholder* pendukung, pelaku bisnis menyediakan fasilitas, komunitas lokal turut serta dalam pengembangan SDM serta mempromosikan pariwisata, akademisi memberikan wawasan, dan media membantu menyebarkan informasi. Hasil keputusan Dinas Pariwisata dari ide dan saran para *stakeholder* menghasilkan kerjasama berupa *Momerandum Of Understanding* (MoU) dan bantuan-bantuan dari para *multi-stakeholder* ke Dinas Pariwisata dalam memulihkan pariwisata yang ada di Bulukumba.

a. Kerjasama berupa *Momerandum Of Understanding* (MoU)

Kerjasama berupa *Momerandum Of Understanding* (MoU) adalah ide dari para *stakeholder*, diantaranya PT. Asuransi Jasaraharja Putera, Komunitas Generasi Pesona Indonesia dan Politeknik Pariwisata Makassar.

Berikut MoU Dinas Pariwisata dengan *stakeholder* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera tentang Asuransi *Public Liability* Kawasan Wisata Tanjung Bira Nomor: Perj.03/XII/2020/Dispar dan Nomor: P/06/KS/XII/2020.

Gambar 4.4
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan PT.
Asuransi Jasaraharja Putera



Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba, 2020

Mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan kepada pengunjung maka Dinas Pariwisata Bulukumba melakukan terobosan dengan memberikan asuransi kepada para pengunjung kawasan Wisata Bira dari hasil ide dan saran PT. Asuransi Jasaraharja. Penandatanganan MoU berlangsung pada tanggal 30 desember 2020 di kanto lama Dinas Pariwisata

- 2) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Pemuda dengan Olahraga Kabupaten Bulukumba dengan Generasi Pesona Indonesia Bulukumba Nomor: KS. 14/GenPI-BLK/III/2022 dan Nomor: Perj. 02/Disparpora.4/III/2022 tentang Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gambar 4.5
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan
Komunitas GENPI



Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba, 2022

Komunitas Generasi Pesona Indonesia berperan sebagai akselator, dimana peran utama komunitas ini adalah memperkuat daya tarik destinasi pariwisata dengan berperan aktif dalam menjaga warisan budaya dan lingkungan pariwisata serta mempromosikan pariwisata Bulukumba. Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan Komunitas GENPI diselenggarakan pada rangkaian acara festival pinisi yang ke-12.

- 3) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan Politeknik Pariwisata Makassar Nomor: KS.001/310/03/Poltekpar/2020 dan Nomor: Perj.01/XI/2020/Dispar tentang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Kepariwisata Kabupaten Bulukumba.

Gambar 4.6
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan
Politeknik Pariwisata Makassar



Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba, 2022

Pada gambar di atas unsur akademisi sebagai konseptor memiliki peran kunci dalam mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep inovatif. Oleh karena itu dari hasil ide dan saran Politeknik Pariwisata dalam pengambilan keputusan terjalinlah kerjasama yang sesuai dengan peran Politeknis Pariwisata Makassar sebagai unsur akademisi pada konsep *pentahelix*. Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan Politeknik Pariwisata Makassar berlangsung pada Tahun 2022 di Desa Wisata Ara Kabupaten Bulukumba.

- 4) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Utama Bulukumba Nomor: KS. 134.4/119/Dispar.5/VI/2020 dan Nomor: Perj.010/PKS-

BSSB/VI/2020 tentang Elektronifikasi Retribusi Kawasan Wisata Tanjung Bira.

Adapun bentuk program Dinas Pariwisata dengan para *multi-stakeholder* di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program hasil MoU

No	Nama Lembaga	Program Kerja
1	MoU Dinas Pariwisata dengan Bank SULSERBAR	<i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).</i>
2	MoU Dinas Pariwisata dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera	<i>Asuransi Public Liability</i>
3	MoU Dinas Pariwisata dengan Generasi Pesona Indonesia	<i>Familiarization Trip (Famtrip)</i>
4	MoU Dinas Pariwisata dengan Politeknik Pariwisata Makassar	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah program kerja Dinas Pariwisata Bulukumba dengan Bank SULSELBAR, yaitu memudahkan pengunjung membayar di pintu masuk secara non tunai atau system digital menggunakan aplikasi. Asuransi Publik Liability adalah program kerja Dinas Pariwisata dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera tentang asuransi ganti rugi yang dilakukan oleh dinas pariwisata kepada wisatawan yang berkunjung selama masih ada di sekitar kawasan pariwisata Bira

Familiarization Trip (Famtrip) adalah program kerjasama Dinas Pariwisata dengan komunitas Generasi Pesona Indah tentang memperkenalkan Wisata Bulukumba sekaligus mengedukasi komunitas pemuda dan pecinta alam. Riset Ancaman Krisis Kepariwisata Bulukumba adalah program kerja Dinas Pariwisata dengan Politeknik Pariwisata Makassar untuk mengkaji informasi tentang kerawanan bencana pada daya tarik wisata di Kabupaten Bulukumba dalam upaya mengatasi krisis pandemic *Covid-19* di Bulukumba.

- b. Bantuan-Bantuan, Ide, Dan Saran Para *Multi-Stakeholder* yang Dijadikan Program Kerja Dinas Pariwisata

Tingginya jumlah kunjungan pada saat pertamakali dibukanya pariwisata Bulukumba setelah tutup 3 bulan akibat Covid-19 menyebabkan perekonomian pariwisata di Kabupaten Bulukumba pulih, namun dari tingginya jumlah kunjungan pariwisata menimbulkan eskternalitas negatif berupa sampah dari kegiatan wisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dinas lingkungan hidup memberikan saran dan ide pada saat pengambilan keputusan bahwa dalam memulihkan pariwisata Dinas Lingkungan Hidup siap melakukan penanganan terkait kebersihan.

Gambar 4.7
Bantuan Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Pariwisata



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Sampah yang menggunung di Pantai Tanjung Bira pada tanggal 04 Mei 2022 diangkut menggunakan 2 pikap milik Dinas Pariwisata Bulukumba dan dibantu 2 truk milik DLHK Bulukumba dan Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 20 armada untuk membantu jalannya pembersihan.

Adapun bentuk bantuan dari Bank SULSERBAR untuk mendukung tingginya jumlah pengunjung Pariwisata Bulukumba dan program kebersihan yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Bank Sulselbar menyumbangkan 10 unit motor roda tiga. Sepuluh unit motor tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank Sulselbar Kabupaten Bulukumba Bupati Bulukumba usai pelaksanaan mutasi pejabat struktural di Ruang Pola.

Gambar 4.8
Bantuan Bank SULSELBAR



Sumber data: Bank SULSELBAR cabang Bulukumba, 2021

Bantuan 10 unit motor pengangkut sampah dari Bank SULSELBAR diberikan usai pelaksanaan mutasi pejabat structural di ruang pole pada tanggal 11 Juni 2021 kepada Pemerintah Daerah Bulukumba. Bupati Bulukumba meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *leading sector*, untuk menggunakan armada sampah tersebut di wilayah yang prioritas membutuhkan motor pengangkut sampah.

Selanjutnya untuk unsur komunitas, yaitu MASATA peneliti menyimpulkan bahwa ide dan saran yang diberikan komunitas tersebut pada saat pengambilan keputusan kepada Dinas Pariwisata dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang bertujuan mengembangkan SDM terkait kepariwisataan.

Gambar 4.9
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata



Sumber data: Dinas Pariwisata, 2022

Ketua DPC Masyarakat Sadar Wisata memberikan materi pada tentang pelatihan pengelolaan desa wisata yang diselenggarakan Dinas Pariwisata sebagai bentuk ide dan saran dari komunitas Masyarakat Sadar Wisata. Selanjutnya unsur media yang berperan sebagai *expenders* berarti memiliki peran dalam memperluas informasi, maka bentuk partisipasi pelaksanaan Simpul Indonesia dalam mendukung pemulihan pariwisata adalah memberikan informasi terpercaya, terkini, dan terupdate melalui portal *simpulindonesia.com*

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah keterlibatan aktif dan andil dari berbagai pihak dalam menikmati hasil atau manfaat dari suatu pelaksanaan kebijakan, program atau proyek. Dari hasil observasi penulis terkait partisipasi dalam pengambilan manfaat ditemukan bahwa adanya hubungan *simbiosis mutualisme* yaitu saling menguntungkan dari hasil keputusan untuk melakukan kerjasama. Hal ini sejalan dengan

penelitian (Lontah 2015) ada tiga fungsi utama dalam pendekatan partisipasi *multi-stakeholder* menurut Donaldson dan Peterson salah satunya, yaitu fungsi normative yang merujuk pada *stakeholder* memiliki hak untuk menerima imbalan atau manfaat dari bentuk kerjasama yang dilakukan.

Hasil dari keputusan yang diambil memberikan dampak positif secara merata kepada semua pihak yang terlibat. Dampak positif yang paling dirasakan Dinas Pariwisata adalah peningkatan jumlah PAD dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba semakin dikenal atas bantuan dari *stakeholder* pariwisata.

Gambar 4.10
Daftar Realisasi PAD Tahun 2020-2022



PAD Dinas Pariwisata Bulukumba setiap tahunnya meningkat, hal ini tidak lepas dari kerjasama yang terjalin dengan *multi-stakeholder*. Berdasarkan dari hasil wawancara dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para *stakeholder*, termasuk pemerintah

daerah, pelaku bisnis, komunitas lokal, akademisi, dan media, sama-sama merasakan manfaat dari bentuk kerjasama yang mereka lakukan. Peningkatan pendapatan, pelestarian budaya lokal, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur menjadi hasil positif yang diambil dari keterlibatan mereka. Hubungan *simbiosis mutualisme* yang terbentuk memberikan tanda bahwa kolaborasi ini menguntungkan semua pihak yang terlibat.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan aktif berbagai *stakeholder* dalam menilai atau menganalisis kerjasama di antara mereka sehingga menghasilkan progres dan keberhasilan. Hal ini sejalan dengan fungsi *stakeholder instrumental* Donaldson dan Paterson, evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk pencapaian keberhasilan suatu kerjasama (Lontah,2015).

Dari hasil wawancara dan analisa yang diperoleh, peneliti terkait partisipasi para *stakeholder* dalam pengevaluasian menyimpulkan Dinas Pariwisata sebagai *leading* sektor dalam pengelolaan dan evaluasi program pariwisata. Meskipun telah dibentuk UPTD Pengelola Obyek Wisata untuk menangani aspek teknis dan administratif, Dinas Pariwisata tetap terlibat secara langsung dalam pengawasan lapangan termasuk melibatkan *stakeholder* dalam mengevaluasi kerjasama yang dijalankan dari hasil pengambilan keputusan.

Keterlibatan unsur pemerintah tidak hanya terbatas pada Dinas Pariwisata, namun juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dalam hal pengelolaan sampah berbahaya. Proses evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai progres kerjasama dan keberhasilan implementasi program. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan kolaborasi yang efektif untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata.

Sementara itu, unsur bisnis, seperti Bank SULSELBAR Bulukumba berkontribusi dalam proses evaluasi melalui keterlibatan dalam transaksi dana hasil pengunjung dan PT Asuransi Jasaraharja Putera,. Meskipun terdapat keterbatasan personel yang mengakibatkan keterlibatan jarak jauh, mereka tetap aktif memantau premi dan klaim.

Dalam konteks komunitas, GENPI dan MASATA menunjukkan partisipasi aktif dalam proses evaluasi. GENPI berfokus pada penginformasian melalui media online, terutama terkait tingkat kepuasan pengunjung. Sementara MASATA, sebagai komunitas sadar wisata, aktif memberikan masukan dan saran kepada Dinas Pariwisata. Unsur akademisi dari Politeknik Pariwisata Makassar juga terlibat dalam evaluasi kegiatan. Dinas Pariwisata secara berkala memanggil untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan serta merencanakan kegiatan mendatang. Terakhir, media, melalui Simpul Indonesia, ikut berpartisipasi dalam evaluasi dengan menilai peningkatan animo masyarakat terhadap pemberitaan.

Hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa *stakeholder* aktif dalam pengevaluasian program kerjasama masing-masing yang terjalin dengan Dinas Pariwisata kemudian hasil partisipasi *multi-stakeholder*

dalam evaluasi menjadi bahan perubahan kedepannya apa-apa saja yang kurang dalam suatu kebijakan atau proses kerjasama yang dijalin.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa wawancara yang penulis lakukan mengenai pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *covid-19* di Bulukumba dengan melihat partisipasi unsur pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media terhadap empat indikator utama dari pendekatan partisipatif, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi penulis menyimpulkan bahwa

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penetapan keputusan tetap berada di tangan pemerintah atau Dinas Pariwisata sebagai pengambil keputusan dan unsur lainnya secara tidak langsung menentukan keputusan dengan memberikan sumbangan ide dan saran mereka terkait pemulihan pariwisata yang disalurkan dalam rapat formal dan non formal dalam setiap pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. *Multi-stakeholder* terlibat dalam bentuk kerjasama dari ide dan masukan para *stakeholder* pada saat pengambilan keputusan. Proses kerjasama yang dilakukan berupa *Momemandum Of Understanding* (MoU) dan bantuan-bantuan dari para *multi-stakeholder* ke Dinas Pariwisata dalam memulihkan pariwisata yang ada di Bulukumba.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dalam proses kerjasama terjalin hubungan simbiosis mutualisme artinya para *stakeholder* mendapatkan manfaat dari kerjasama yang mereka jalin.
4. Partisipasi dalam evaluasi, *stakeholder* aktif dalam pengevaluasian program kerjasama masing-masing yang terjalin dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Keterlibatan *multi-stakeholder*, seperti pemerintah daerah, bisnis, komunitas lokal, akademisi, dan media, telah membentuk pondasi yang kuat dalam memulihkan sektor pariwisata Bulukumba.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai pendekatan partisipatif *multi-stakeholder* dalam pemulihan pariwisata pasca *covid-19* di Bulukumba diharapkan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang menerapkan atau tidak menerapkan pendekatan serupa agar memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keunggulan dan kelemahan dari pendekatan partisipatif *multi-stakeholder*.
2. Pemerintah diharapkan Terus mengkomunikasikan kesuksesan dan manfaat konkret yang diperoleh melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat luas, guna membangun dukungan yang lebih besar untuk pemulihan dan pengembangan pariwisata di Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Agustus, W. (2023). Apa Itu Stakeholder: Tugas, Jenis, dan Contoh.
- Ahmad, A. B. (2018). Citra Destinasi Dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Untuk Berkunjung Kembali Di Sulawesi Selatan Sebagai Destinasi Pariwisata. *Sosiohumaniora*, 20(3), 207–214.
- Ahmad Mustanir, S. I. P., Ibrahim, M., Sofyan, B., SIP, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penerbit Qiara Media.
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2022). Model Proses Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Multi-Stakeholder Partnership. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 111–125.
- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Mengungkap Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 125–135.
- Arisma, A. A. R. (2019). Analisis Dampak Pengembangan Wisata Pantai Tanjung Bira Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Bulukumba. In *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (pp. 1–82). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Budhi, M. K. S., Lestari, N. P. N. E., & Suasih, N. N. R. (2022). The recovery of the tourism industry in Bali province through the penta-helix collaboration strategy in the new normal era. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 40(1), 167–174.
- Buxton, N., & Power, C. (2019). Multistakeholderism: a critical look Workshop Report. Workshop Report-Amsterdam, 10.

- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)*, 1(1), 41–69.
- Chusnia, S., Sa'dijah, C., & Harsati, T. (2017). Analisis kebutuhan instrumen asesmen autentik dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. *Prosiding TEP & PDs: Transformasi Pendidikan Abad 21*, 4(42), 462–470. <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/sntepnpdas/article/view/902/574>
- Deriyanto, D., Qorib, F., Komunikasi, J. I., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2018). Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok. *Jisip*, 7(2), 77. www.publikasi.unitri.ac.id
- Dewi, M. R., Nurfani, H. D., Borneo, A. N. A., & Arung, R. (2020). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara. *SPECTA Journal of Technology*, 4(1), 35–40.
- Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Diakses Dari: <https://www.academia.edu/download/0>, 1–7.
- Echa, G. P. (2018). Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Pembelajaran Berbasis Internet. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Eva, R., E.K.S, H. M., & Nunung Khusnul, F. (2007). Potensi Bahaya Di Kawasan Wisata Gunung Bromo, Resort Tengger Laut Pasir, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. *Media Konservasi*, 12(3).
- Fajri, R. (2022). Kontestasi Pengetahuan dan Kontribusi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Budidaya Udang Windu Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang) Knowledge Contestation and Multi-stakeholders Contributions In Tthe Development Of Sustai. Universitas Hasanuddin.
- Fitriana, R., Simanjuntak, D., Dewanti, R., & Author, C. (2020). Pembekalan materi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) dalam training of trainers akademisi pendamping desa wisata. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 138–145.
- Freeman, R. E. (2020). The stakeholder approach revisited. *Wirtschafts-Und Unternehmensethik*, 657–671.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art.

- Gantino, R. (2016). Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 19–32.
- Gunarta, I. G. W. S., & Santoso, I. (2006). Pendekatan Multi-Stakeholders dalam Penanganan Overloading. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 17(1).
- Hakim, arif rahman, Surya, I., & Hasana, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Ka Bupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Hakim, M. A. (2022). Strategi Pentahelix pada Perencanaan Pariwisata di Desa Hegarmukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Destinesia Jurnal Hospitaliti & Pariwisata*, 4(1), 9.
- Halim, W. S. (2016). Analisis Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Pada Perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. *Agora*, 4(1), 179–185.
- Hamka, H., Nadia, Y., Supardi, H., Namora, F., & Jiasti, F. D. (2022). Collaborative Governance Model Dalam Membangun Sustainable Integrated Ecotourism di LMDH Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*.
- Handayani, A., Widiastuti, W., & Hermawan A (2022). The Tourism Sector Stakeholder Collaboration Role In Post Covid 19 Economic Recovery of Central Java, Indonesia. *Journal of Resilient*. <https://journals.jcu.edu.au/jre/article/view/3909>
- Harris, Z. (2022). Arahan Pengembangan Wisata Pantai Panrang Luhu, Kabupaten Bulukumba Dengan Analisis Msp Dm (Marketability, Sustaina Bility, Participatory, Disaster Mitigation) Directions Of Tourism Development Of Panrang Luhu Beach, Bulukumba Regency With Msp Dm Analy. Universitas Hasanuddin.
- Heger, T., & Rohrbeck, R. (2012). Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(5), 819–831.
- Hemmati, M. (2012). *Multi-stakeholder processes for governance and sustainability: beyond deadlock and conflict*. Routledge.
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung. In *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 7 (1), 1-30.

- Insani, S. M., Zahra, S. A., & Wijayanti, F. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Kua Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 1–10.
- Jubir, J., Ikbal, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu. *Jesya*, 6(1), 71–91. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174.
- Lontah, E. N. (2015). Stakeholder Theory Dan Karya Keselamatan Schindler. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 37–50.
- Lumanauw, N. (2020). Edukasi Dan Implementasi Protokol Clean Health Safety Environment Melalui We Love Bali Kemenparekraf Pada Program 10 Sanur Nusa Penida Nusa Lembongan Sanur. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 11(1), 71–81.
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65–86.
- Mamuko, F., Walangitan, H., & Tilaar, W. (2016). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Eugenia*, 22(2). <https://doi.org/10.35791/eug.22.2.2016.12959>
- Maria, E., & Hudiono, R. K. (2020). Pembangunan Website Dusun Srumbung Gunung dan Pelatihan Administrator Website: Solusi Promosi Era Kenormalan Baru.
- Marwan, M., & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 123–153.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>

- Nasution, M. S., Handoko, T., Rahmanto, F., & M., Mayarni (2023). Post-COVID Tourism Recovery Strategy for Tourism Villages: Multi-Stakeholder Participatory Approaches.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3–4.
- Nur Adyla, S., Nurlaela, S. P., & Haeruddin Hafid, S. E. (2023). Buku Ajar Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya. Deepublish.
- Oktari, R. (2021). GRATIS! Sertifikasi CHSE untuk Destinasi Wisata Aman COVID-19. IndonesiaBaik. ID.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., Amaliyah, I., & Ardana, A. K. (2020). Strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1–21.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463.
- Panneer, S., Kantamaneni, K., Pushparaj, R. R. B., Shekhar, S., Bhat, L., & Rice, L. (2021). Multistakeholder participation in disaster Management—The case of the COVID-19 pandemic. *Healthcare*, 9(2), 203.
- Pratiwi, W. R., & Acfira, L. G. (2023). Membangun Keberanian sebagai Tourism English Public Speaker untuk Generasi Muda Bulukumba. *BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 8–14.
- Purnaya, I. G. K., & Titing Koerniawaty, F. (2018). Ideologi Yang Memengaruhi Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 6(2), 75–84. <https://doi.org/10.22334/jihm.v6i2.22>
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Rahim, F. (2012). Pedoman Kelompok Sadar Wisata: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Ramadahni, H. (2020). Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Di Bulukumba. Universitas Bosowa.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (33), 81.
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan*

- Dan Konseling (JPDK), 5(1), 4293–4302.
- Rosmilawati, S., Sari, M., & Ananda, A. R. (2022). Pendampingan Penerapan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment) Bagi Pengelola Tempat Wisata Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.1 Desember), 953–959.
- Sallatu, M. A. (2007). Partisipasi Stakeholder Dalam Formulasi RPJP-D Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026. Universitas Hasanuddin.
- Simanjorang, F., Hakim, L., & Sunarti, S. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir. *Profit*, 14(01), 42–52. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.01.5>
- Simaremare, D. (2022). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Sumilat, H., & Destriana, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-2), 129–140.
- Wahid, S. H., Kususiyannah, A., Sirait, W. Y., & Umbar, K. (2023). Analisis Data Kualitatif Menggunakan Nvivo. *Publica Indonesia Utama*.
- Wea, N. R. I., Ahimsa-Putra, H. S., & Widiyastuti, D. (2023). Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Ziarah Ritual Semana Santa oleh Pemerintah di Larantuka. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(04), 247–269. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i04.292>
- Wikayanto, A., Yudoprakoso, B. F., Kurniawan, E., Wilson, D., & Prana, I. S. (2022). Strategi Pemulihan Dan Percepatan Pengembangan Industri Animasi Indonesia Pasca Pandemi. *Masyarakat Indonesia*, 47(1), 105–122.
- Xue, Y., Temeljotov-Salaj, A., Engebø, A., & Lohne, J. (2020). Multi-sector partnerships in the urban development context: A scoping review. *Journal of Cleaner Production*, 268, 122291.
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1–9.
- Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri X Nomor*, 1.

L

A

M

P

I

R

A

N



Dokumentasi Informan

1. Dokumentasi Unsur Pemerintah



**Gambar Wawancara dengan Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Idiawaty, S.S., M.M)**



**Gambar Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah
Bahan Berbahaya Beracun (LB3) Dan Peningkatan Kapasitas Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bulukumba. (Masykur Amin)**

2. Dokumentasi Unsur Bisnis



**Gambar Wawancara dengan Ketua Seksi Umum Bank SULSELBAR
Bulukumba (Muhammad Yusuf Muhammadiyah)**



**Gambar Wawancara dengan *Claim Service Assitant Manager* PT Asuransi
Jasaraha Putera Makassar (Ayu Octaviany Puspitasari, S.A.B)**

3. Dokumentasi Unsur Komunitas



**Gambar Wawancara dengan Ketua Komunitas Generasi Pesona Indonesia
(A. Aryono, S.IP., M.M)**



**Gambar Wawancara dengan Ketua Komunitas Masyarakat Sadar Wisata
(H. Safiuddin, S.Sos)**

4. Dokumentasi Unsur Akademisi



**Gambar Wawancara dengan Ketua Program Studi Tata Hidang Politeknik
Pariwisata Makassar (Dr. A. Hasbi, M.M., CHE)**

5. Dokumentasi Unsur Media



**Gambar Wawancara dengan Wakil Direktur Media Sempul Indonesia
(A. Azisul Haq)**

Dokumen Pendukung

1. Program kerjasama Dinas Pariwisata dengan Bank SULSELBAR



Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

2. Program kerjasama Dinas Pariwisata dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera



Asuransi Public Liability

3. Program kerjasama Dinas Pariwisata dengan Generasi Pesona Indonesia



Familiarization Trip (Famtrip)

4. Program kerjasama Dinas Pariwisata dengan Politeknik Pariwisata Makassar



Praktek Observasi Bertemakan Pendidikan Marine Tourism and Beyond

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke pariwisata bulukumba tahun 2019-2022



6. Pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba

No	Kategori Wisata	Nama Pariwisata
1	Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Permandian Wae Hongkong • Permandian Alam Wae Tuo Tembo'e • Permandian Alam Korner • Hutam Mangrove Luppung
2	Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai Bira • Pantai Lemo-Lemo • Pantai Bara • Teras Tanjung Bira • Pantai Tanjung Salorang
3	Wisata Buatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan Karet • Permandian Limbua • Wisata Empang Sapiri
4	Wisata Religi	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Adat Amatoa Kajang • Makam Sultan Daeng Radja • Makam Dato' Tiro • Makam Raja Bone • Bola Kambarae

7. Izin Penelitian dari DPMPTSP Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 31695/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 lembar	Terlampir
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2997/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURZAFIQAH
Nomor Pokok	: 105641101920
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENDEKATAN PARTISIPATIF MULTI STAKEHOLDER DALAM PEMULIHAN PARWISATA PASCA COVID-19 DI BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *20 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

8. Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Bulukumba



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 017/DPMPTSP/IP/I/2024**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor: 074/0018/Bakesbangpol/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Nurzafiqah
Nomor Pokok	: 105641101920
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 2002-01-12
Alamat	: Dusun Macinna
Jenis Penelitian	: Kualitatif
Judul Penelitian	: Pendekatan partisipatif multi stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca covid-19 di Bulukumba
Lokasi Penelitian	: Bulukumba
Pendamping	: Ahmad Harakan dan Nu Khaerah
Instansi Penelitian	: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bank Sulselbar, PT Asuransi Jasaraha, Suara Pannita Lopi, Radar Selatan
Lama Penelitian	: tanggal 20 Desember 2023 s/d 20 Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampir hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



Kepala Dinas DPMPTSP
Drs. H. Umrah Arwan, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Np : 19670304 199303 2 010

9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA

Gedung Piri Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Bulukumba 92511
 E-mail : disbutparbulukumba@gmail.com website: <https://disparpora.bulukumbakab.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 500.13.6.1/51/Disparpora/I/2024

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor: 017/DPMPTSPTK/IP/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, Perihal Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurzafiqah
 No. Pokok : 105641101920
 Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan
 Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Dusun Macinna

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 25 Januari 2024 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, dengan judul skripsi "**Pendekatan Partisipatif Multi Stakeholder dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba**" sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 Januari 2024

Kepala Dinas



Ferryawan Z Fahmi, S.STP., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19820212 200212 1 001

10. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nursafiqah
Nim : 105641101920
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Februari 2024
Mengetahui

Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyahid S. Hum, M.I.P.
N.N.M. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Nurzafiqah 105641101920 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 core.ac.uk
Internet Source

5%

2 id.123dok.com
Internet Source

3%

3 repository.umy.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Nurzafiqah 105641101920 BAB II

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.stiami.ac.id Internet Source	2%
2	chub.fisipol.ugm.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
4	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	masata.or.id Internet Source	1%

Nurzafiqah 105641101920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On

Nurzafiqah 105641101920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	2%
3	amp.terkini.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	ppid.cilacapkab.go.id Internet Source	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	id.wikipedia.org Internet Source	1%
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
9	www.kabarmakassar.com Internet Source	1%

Nurzafiqah 105641101920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



NURZAFIQAH, dilahirkan di Kabupaten Bulukumba pada 12 Februari 2002, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Darma. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 255 Paranglohe dan lulus pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 24 Bulukumba dan lulus pada Tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 06 Bulukumba dan lulus pada Tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2024. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang-orang terkasih, peneliti dapat menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga penelitian tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pendekatan Partisipatif *Multi-Stakeholder* dalam Pemulihan Pariwisata Pasca *Covid-19* di Bulukumba) “.